



BADAN
WAKAF
INDONESIA



Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021



BADAN
WAKAF
INDONESIA



Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021

Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021

Pusat Kajian dan Transformasi Digital - Badan Wakaf Indonesia
© 2022

ISBN : 9786026080271

Tim Penyusun Indeks Wakaf Nasional 2021

- Penasehat : Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA
Dr. Imam Teguh Saptono
Dr. Yuli Yasin
Sarmidi Husna, MA
drh. Emmy Hamidiyah, MSi
Mochammad Sukron, SE
Hafiz Gaffar, SE, MM
- Pengarah : Irfan Syauqi Beik, PhD
Hendri Tanjung, PhD
Prof. Dr. Nurul Huda
Ir. Arief Rohman Yulianto, MM
Drs. Susono Yusuf
- Peneliti : Prof. Dr. Raditya Sukmana
Prof. Dr. Mahfud Sholihin
Dr. Yuliani Dwi Lestari
Dr. Khalifah Muhamad Ali
Imam Wahyudi Indrawan, S.EI., M.Ec
- Asisten Peneliti : Indah Fresma Sari, SE
Amelia Nadiyah Wahyu Putri, SE
Faridatus Saidah, MSM, S. Farm, apt.
Aghnia Nadhira Aliya Putri, MSM, S. Farm, apt.
Hanifia Ihza Manila
- Copyeditor : Nurka'ib
- Desain & Tata Letak : Thomas Adi Saputra, SE

Penerbit

Badan Wakaf Indonesia
Gedung Bayt Al-Quran Lt 2
Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560
Telp : +6221 - 87799232, 87799311
Website : www.bwi.go.id

KATA PENGANTAR



Prof. Dr. Ir. Mohammad NUH, DEA
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, karena hati kita masih dipertautkan dengan perwakafan, salah satu ibadah yang berdimensi abadi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Sebagai filantropi Islam, Wakaf memiliki cakupan dimensi yang luas, meliputi: peribadatan, dakwah, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, konservasi lingkungan, peningkatan kesejahteraan, dan lain-lain. Sehingga wakaf itu sebuah system bauran dengan peradaban. Dan itu semua telah dibuktikan peran realnya dalam dimensi kesejarahan. Untuk itu, nilai dan praktek wakaf harus dibangun kembali-revival untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas dakwah dan menjaga kemartabatan serta nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sebagai sebuah Sistem, apalagi Sistem Berskala Besar (Large Scale System), dalam pengembangan perwakafan nasional diperlukan instrumen untuk mengukur kinerja capaian dari berbagai dimensi. Hasil dari pengukuran tersebut bisa digunakan sebagai peta jalan pengembangan perwakafan nasional.

Alhamdulillah, pada tahun 2020 Tim Peneliti Riset Kolaborasi Indonesia yang berasal dari beberapa perguruan tinggi telah menghasilkan riset Indeks Wakaf Nasional sebagai alat ukur perkembangan wakaf pertama berbasis riset di Indonesia. Indeks Wakaf Nasional (IWN) ini menjadi penting sebagai jawaban atas kebutuhan akan alat ukur standar yang mampu mengukur kinerja dan perkembangan wakaf secara nasional dengan pendekatan multidimensi.

LAPORAN RISET INDEKS WAKAF NASIONAL 2021 (IWN 2021) ini merupakan laporan hasil riset implementasi atas IWN 2021 yang bisa digunakan untuk melihat kinerja dan perkembangan wakaf secara nasional maupun per provinsi selama tahun 2021. Harapannya, pertama, hasil riset ini bisa menjadi bahan evaluasi dan pembuatan kebijakan perwakafan nasional ke depan bagi Badan Wakaf Indonesia dan semua pemangku kepentingan wakaf nasional. Kedua, sebagai peta jalan, maka riset IWN harus dilaksanakan setiap tahun dan Ketiga, melalui riset IWN ini kita jadikan wakaf sebagai sumber pembelajaran sekaligus wahana pemelitian untuk pengembangan keilmuan tentang perwakafan. Wakaf bukan sekedar praktek keagamaan, tapi juga sumber keilmuan.

Atas nama Badan Wakaf Indonesia (BWI), saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim peneliti yang telah berikhtiar menghadirkan IWN 2021 di tengah kondisi pandemi. Semoga Allah menjadikan ikhtiar tersebut sebagai bagian dari amaliah wakaf, yang pahalanya terus mengalir sampai akhir masa.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 21 Februari 2022.

Prof. Dr. Ir. Mohammad NUH, DEA
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR 7

DAFTAR TABEL 8

BAB 1 - PENDAHULUAN 9

BAB 2 - TINJAUAN PUSTAKA 13

- 2.1 Konsep Wakaf 14**
- 2.2 Indeks untuk Mengukur Kinerja Wakaf 15**
- 2.3 Indeks Wakaf Nasional 17**
 - 2.3.1 Faktor regulasi (Regulation Factor) 18
 - 2.3.2 Faktor Kelembagaan (Institution Factor) 19
 - 2.3.3 Faktor Proses (Process Factor) 20
 - 2.3.4 Faktor Sistem (System Factor) 21
 - 2.3.5 Faktor Hasil (Outcome Factor) 23
 - 2.3.6 Faktor Dampak Faktor (Impact Factor) 23
 - 2.3.7 Penelitian Terdahulu 25

BAB 3 – METODE PENELITIAN 27

- 3.1 Penilaian Faktor Regulasi (Regulation Factor) 28**
 - 3.1.1 Dukungan regulasi (X1.1) 28
 - 3.1.2 Dukungan Anggaran Pemerintah (X1.2) 29
 - 3.1.3 Dukungan Pembinaan oleh Otoritas (X1.3) 29
- 3.2 Penilaian Faktor Kelembagaan (Institution Factor) 29**
 - 3.2.1 Kualitas Manajemen Mutawalli (X2.1) 29
 - 3.2.2 Status Mutawalli (X2.2) 30
- 3.3 Penilaian Faktor Proses (Process Factor) 30**
 - 3.3.1 Pengumpulan (X3.1) 30
 - 3.3.2 Pengelolaan (X3.2) 31
 - 3.3.3 Pelaporan (X3.3) 31
- 3.4 Penilaian Faktor Sistem (System Factor) 31**
 - 3.4.1 Legalitas Wakaf Tanah (X4.1) 31
 - 3.4.2 Kepatuhan Syariah (X4.2) 32
 - 3.4.3 Manajemen Informasi Publik (X4.3) 32
- 3.5 Penilaian Faktor Hasil (Outcome Factor) 33**
 - 3.5.1 Rasio Wakaf Produktif (X5.1) 33
 - 3.5.2 Jangkauan Mauquf 'Alaih (X5.2) 33
- 3.6 Penilaian Faktor Dampak (Impact Factor) 34**
 - 3.6.1 Indeks Kesejahteraan CIBEST (X6.1) 34
 - 3.6.2 Modifikasi IPM (X6.2) 34
 - 3.6.3 Indeks Kemandirian (X6.3) 34
 - 3.6.4 Infrastruktur (X6.4) 34

BAB 4 – HASIL DAN PEMBAHASAN 37

- 4.1 IWN Nasional 38**
- 4.2 IWN Provinsi 44**
 - 1. Bali 44
 - 2. DKI Jakarta 46

3. Kalimantan Timur	48
4. Jawa Timur	49
5. Sumatera Selatan	51
6. Aceh	53
7. Maluku	55
8. Jawa Tengah	57
9. Sulawesi Tenggara	58
10. Kalimantan Selatan	60
11. Maluku Utara	61
12. Bangka Belitung	63
13. Daerah Istimewa Yogyakarta	65
14. Banten	66
15. Sumatera Barat	68
16. Nusa Tenggara Barat	70
17. Nusa Tenggara Timur	71
18. Bengkulu	72
19. Kalimantan Tengah	74
20. Kalimantan Utara	76
21. Kalimantan Barat	77
22. Lampung	79
23. Jambi	81
24. Papua	83
25. Kepulauan Riau	85
26. Sulawesi Tengah	86
27. Jawa Barat	88
28. Sulawesi Utara	90
29. Sulawesi Selatan	91
30. Sumatera Utara	93
31. Gorontalo	94
32. Sulawesi Barat	96
33. Riau	97
34. Papua Barat	99

BAB 5 - KESIMPULAN DAN SARAN 101

5.1 Kesimpulan 102

5.2 Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

DAFTAR GAMBAR

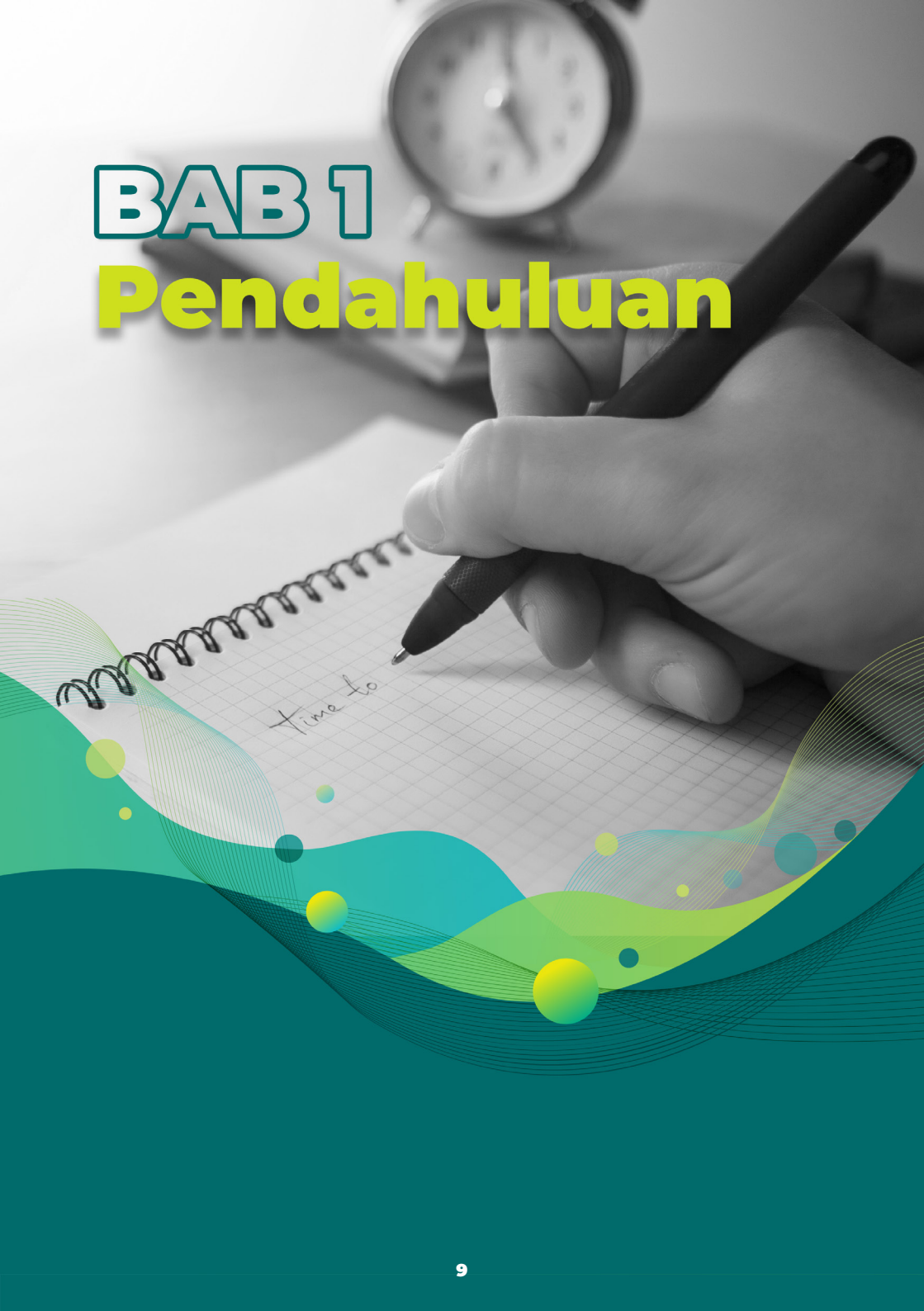
Gambar 1 Skema IWN 17

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Indeks Akuntabilitas Wakaf Tunai	16
Tabel 2	Kategori Nilai Indeks Wakaf Nasional	25
Tabel 3	Hasil Perhitungan IWN Provinsi dan Nasional tahun 2021	39
Tabel 4	Hasil Perhitungan IWN Provinsi dan Nasional tahun 2021 dan 2020	40
Tabel 5	Jumlah Provinsi pada Kategori IWN tahun 2020 dan 2021	42
Tabel 6	Hasil Perhitungan IWN Provinsi dan Nasional setiap Faktor dan Pertumbuhan tahun 2020-2021	42
Tabel 7	Nilai data Mentah Provinsi Bali Tahun 2020-2021	44
Tabel 8	Nilai data Mentah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021	47
Tabel 9	Nilai data Mentah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2021	48
Tabel 10	Nilai data Mentah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021	50
Tabel 11	Nilai data Mentah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021	52
Tabel 12	Nilai data Mentah Provinsi Aceh Tahun 2020-2021	54
Tabel 13	Nilai data mentah Provinsi Maluku 2020-2021	55
Tabel 14	Nilai data mentah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021	57
Tabel 15	Nilai data mentah Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2021	59
Tabel 16	Nilai data mentah Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2021	60
Tabel 17	Nilai data mentah Provinsi Maluku Utara 2020-2021	62
Tabel 18	Nilai data mentah Provinsi Bangka Belitung 2020-2021	64
Tabel 19	Nilai data mentah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2021	65
Tabel 20	Nilai data mentah Provinsi Banten 2020-2021	67
Tabel 21	Nilai data mentah Provinsi Sumatera Barat 2020-2021	69
Tabel 22	Nilai data mentah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2021	70
Tabel 23	Nilai data mentah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2021	71
Tabel 24	Nilai data mentah Provinsi Bengkulu 2020-2021	73
Tabel 25	Nilai data mentah Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2021	75
Tabel 26	Nilai data mentah Provinsi Kalimantan Utara 2020-2021	76
Tabel 27	Nilai data mentah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2021	78
Tabel 28	Nilai data mentah Provinsi Lampung Tahun 2020-2021	80
Tabel 29	Nilai data mentah Provinsi Jambi Tahun 2020-2021	82
Tabel 30	Nilai data mentah Provinsi Papua Tahun 2020-2021	83
Tabel 31	Nilai data mentah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2021	85
Tabel 32	Nilai data mentah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2021	87
Tabel 33	Nilai data mentah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021	88
Tabel 34	Nilai data mentah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2021	90
Tabel 35	Nilai data mentah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021	92
Tabel 36	Nilai data mentah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2021	93
Tabel 37	Nilai data mentah Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021	95
Tabel 38	Nilai data mentah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2021	96
Tabel 39	Nilai data mentah Provinsi Riau tahun 2020-2021	98
Tabel 40	Nilai data mentah Provinsi Papua Barat tahun 2020-2021	100

BAB 1

Pendahuluan



BAB 1 - PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah*. Hingga saat ini, wakaf memainkan peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat baik secara spiritual maupun material. Ditengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan ekonomi, keberadaan wakaf sangatlah penting. Kahf (2003) melaporkan bahwa pada tahun 1800 silam, tanah wakaf mencakup sebagian besar wilayah tanah di Mesir, Aljazair, Turki, dan Palestina. Penggunaan wakaf pada saat ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembiayaan pelayanan yang diperlukan untuk masyarakat umum termasuk masjid, sekolah, rumah sakit, dan wadah lainnya yang memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan.

Pada saat ini, pemahaman mengenai wakaf produktif masih sangat lemah. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya dukungan lembaga keuangan, sosialisasi kepada masyarakat, dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap wakaf. Pemahaman wakaf yang masih terbatas menjadi penyebab kurangnya fasilitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat islam baik di Indonesia maupun secara global.

Kesadaran dari masyarakat Muslim di Indonesia terus berkembang dan tidak bisa dihindari untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Berdasarkan data dari divisi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan World Giving Index (2019), Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya potensi wakaf, termasuk wakaf uang dan tanah yang mencapai potensi Rp 2000 triliun per tahun. Pada saat ini hanya terdapat 52 ribu hektar tanah yang diwakafkan di 390 ribu titik.

Permasalahan wakaf di Indonesia tidak hanya terkait persepsi masyarakat terhadap wakaf ataupun minimnya dukungan dari pemerintah tetapi juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf profesionalisme pengelola wakaf/nazhir (Huda et al., 2017) serta tidak adanya data terintegrasi terkait wakaf yang menunjukkan perkembangan kinerja wakaf di Indonesia. Sehingga, perlu adanya pengukuran kinerja wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan wakaf dan sebagai alat untuk memantau perkembangan wakaf (Siraj, 2012; Khalil, Ali dan Shaiban, 2014; Siswantoro, Rosdiana dan Fathurahman, 2017).

Adanya Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang telah diluncurkan pada tahun 2020 sebagai alat pengukuran terstandar dapat menjadi acuan kinerja wakaf nasional. Hasil yang didapat dari perhitungan indeks wakaf dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran setiap wilayah dari waktu ke waktu untuk menyiapkan rencana jangka panjang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Adanya pengukuran indeks wakaf yang terstandar dan dapat diterima di tingkat negara juga dapat menjadi alat otoritas wakaf untuk mengevaluasi dan memantau kondisi keseluruhan kegiatan wakaf di suatu negara serta meningkatkan pencatatan aset wakaf (Zain, Mahadi dan Noor, 2019), serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelola wakaf secara keseluruhan di suatu negara (Noordin, Haron dan Kassim, 2017). Pada penyusunan Indeks Wakaf Nasional, kelengkapan indeks sangat penting dan harus memenuhi berbagai aspek seperti aspek pengelolaan wakaf, sistem pendukung, dan dampak wakaf bagi masyarakat ditambah aspek pencapaian agenda pembangunan. Hal tersebut diperlukan karena indeks kinerja wakaf tingkat negara dapat menjadi tolak ukur bagi seluruh mutawali untuk dipatuhi demi kemajuan pengelolaan wakaf dan menjadi media untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang bagaimana wakaf telah berhasil bagi masyarakat dan sejauh mana potensi wakaf telah dimanfaatkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf. Sehingga agenda pembangunan wakaf dapat terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran indeks wakaf nasional (IWN) pada tingkat provinsi dan wilayah di Indonesia yang mana hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan wakaf mengingat dampaknya yang sangat besar bagi masyarakat.

BAB 2

Tinjauan Pustaka



BAB 2 - TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Wakaf

Secara etimologis, wakaf (atau *awqaf* untuk jamak) adalah kata yang dapat diartikan sebagai penahanan dalam bahasa Inggris. Dari sudut pandang kesyariahan, bagaimanapun, kata wakaf berarti “melepaskan kepemilikan harta yang didedikasikan (*mawqūf*) dari orang yang melakukan wakaf (*waqīf*) kepada Allah sehingga apa pun yang dihasilkan dan didapatkan dari *mawqūf* hanya bertujuan untuk kepentingan agama dan tujuan kemanusiaan” (Abduh, 2019). Ada tiga karakteristik utama wakaf: (i) abadi, (ii) tidak dapat dibatalkan dan (iii) tidak dapat dicabut (Zain, Mahadi dan Noor, 2019; Osman dan Agyemang, 2020).

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus tentang wakaf. Tetapi, pernyataan tersirat dapat ditemukan dalam ayat ini: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, kecuali kamu memberi (dengan cuma-cuma) sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu berikan, Allah Maha Mengetahui (*sūrat āl ‘im'rān*: 92). Juga, dari riwayat Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa perbuatan yang memberikan pahala abadi bagi manusia bahkan setelah kematiannya disebut sedekah jariah (sedekah tanpa akhir). Cendekiawan muslim kemudian menafsirkan sedekah jariah sebagai wakaf (Hassan, Alhabshi dan Yusoff, 2017; Che Mohd Salleh et al., 2020).

Berdasarkan tujuannya, wakaf dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Pertama, wakaf khayr, wakaf yang manfaat atau pendapatan dari pengelolaan harta wakaf akan disalurkan untuk membantu keuangan individu dan/atau masyarakat umum. Wakaf jenis ini meliputi masjid, sekolah, dan sebagainya. Kedua, wakaf ahli, wakaf yang manfaat atau pendapatan dari pengelolaan harta wakaf akan digunakan untuk membantu anak dan keluarga wakif (donor). Akan tetapi, keluarga tidak berhak memberikan atau menjual harta wakaf. Ketiga, wakaf al-awarid, yaitu wakaf yang manfaat atau pendapatan dari pengelolaan harta wakaf disimpan sebagai cadangan dan akan digunakan dalam keadaan darurat. Misalnya, jika aset wakaf berupa klinik atau rumah sakit, maka dana tersebut hanya digunakan untuk pasien yang datang berobat (Abduh, 2019). Wakaf juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat keluarannya. Pertama, wakaf *istithmari*, wakaf yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung pemeliharaan aset wakaf. Kedua, wakaf *mubashar*, yaitu wakaf yang dikelola terutama untuk memberikan manfaat dan

pelayanan kepada masyarakat umum (Hassan, Alhabshi dan Yusoff, 2017; Abduh, 2019).

Wakaf telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan publik sejak lama. Keberlanjutan wakaf dimungkinkan selama aset wakaf masih ada dan menghasilkan manfaat. Hukum Islam tidak mengizinkan segala bentuk pengalihan kepemilikan aset wakaf, pemutusan dan/atau pembatalan kontrak wakaf (Zain, Mahadi dan Noor, 2019). Oleh karena itu, wakaf dapat diibaratkan sebagai amanah yang dipercayakan di masyarakat barat. Namun, wakaf dikatakan lebih dahulu ada selama lima abad di masyarakat Muslim Timur Tengah dan Afrika Utara dibandingkan dengan kepercayaan barat (Abduh, 2019; Abdullah, 2019). Meskipun wakaf merupakan bagian dari infaq (amal umum), namun harta wakaf harus dipelihara oleh pengelola (mutawalli) untuk menjamin keberlangsungan harta dan pelayanannya kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam akad wakaf, sedangkan infaq dapat digunakan untuk tujuan apapun yang penerimanya inginkan (Abduh, 2019).

2.2 Indeks untuk Mengukur Kinerja Wakaf

Pentingnya indeks kinerja wakaf harus dipertimbangkan oleh pengelola dan otoritas wakaf, terutama untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menghasilkan pengumpulan wakaf dari masyarakat (Khalil, Ali dan Shaiban, 2014). Jika tidak ada indeks wakaf, maka tidak ada standar yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan wakaf di antara para pemangku kepentingan.

Hal ini akan membuat pengelolaan wakaf menjadi pendekatan top-down, yaitu bergerak dengan arahan regulator, bukan pendekatan bottom-up dimana inisiatif untuk mengelola wakaf yang menjadi pendorong utama pengembangan wakaf (Siraj, 2012).

Indeks untuk mengukur kinerja wakaf telah diusulkan oleh dua penelitian. Pertama, Indeks Akuntabilitas Wakaf Tunai yang dikemukakan oleh Siswantoro et al., (2017) yang dirancang dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan penilaian ahli. Tenaga ahli tersebut berjumlah empat orang, terdiri dari ulama dan pengelola wakaf. Indeks Akuntabilitas Wakaf Tunai memiliki beberapa indikator seperti terlihat pada Tabel 1.

Dimensi	Indikator
Keungan	Laporan Keuangan Teraudit
	Arus kas keluar yang diurutkan berdasarkan kategori
	Daftar wakif
	Struktur Organisasi
	Informasi dan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah
	Jurnal Harian Manajemen
Kinerja	Pendapatan Investasi (Laba Bersih per Rata-Rata Total Aset)
	Komentar dari Penerima Manfaat
	Efektivitas Program dan Evaluasi Dampak
	Program Peningkatan Kapasitas Karyawan
	Peraturan Kepegawaian dan Kode Etik
	Informasi Tata Kelola yang Baik
	Indikator Kinerja
Publik	Informasi Manfaat Wakaf Bagi Penerima Manfaat
	Informasi Alokasi Dana untuk Pemberdayaan Sosial
	Laporan Lingkungan
	Tanggapan atas Komentar/Rekomendasi
	Deskripsi Program dan Kegiatan
Hubungan Masyarakat	Penyediaan Kontak dan Akses
	Partisipasi Wakaf Online
	Pembaruan Berita dan Organisasi
	Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aspek Islami	Kepatuhan terhadap Syariah
	Kepatuhan terhadap Peraturan

Tabel 1 Indikator Indeks Akuntabilitas Wakaf Tunai
Sumber : Siswantoro et al., 2017

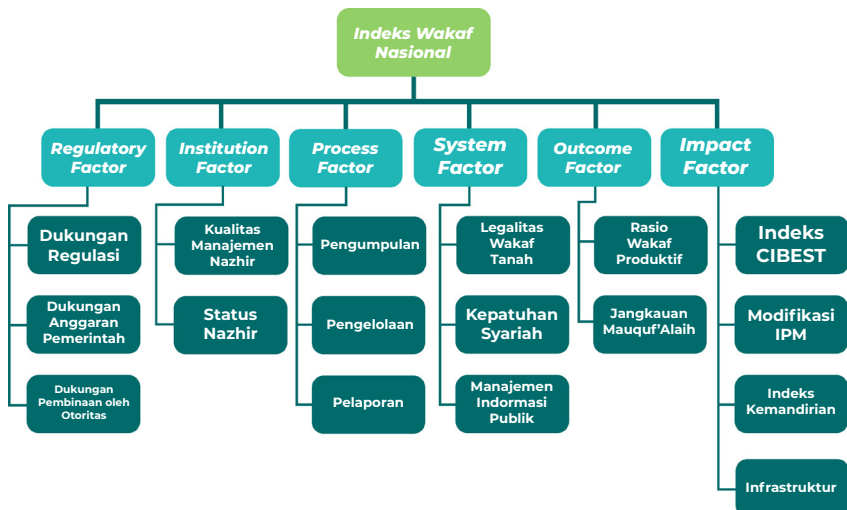
Kedua, Indeks Efisiensi Pengelolaan Wakaf yang dikemukakan oleh Pyeman et al., (2016). Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk menyusun indeks tersebut. Ada dua komponen yaitu input dan output. Untuk variabel pertama digunakan variabel jumlah dana wakaf dari pemerintah dan jumlah pegawai, sedangkan variabel kedua yang digunakan adalah jumlah dana wakaf yang terkumpul dan nilai proyek wakaf. Meskipun upaya yang baik dari studi di atas untuk mengusulkan indeks sebagai alat ukur kinerja wakaf, indeks yang diusulkan hanya berfokus pada lembaga wakaf, bukan sistem wakaf secara keseluruhan. Membangun indeks wakaf harus mencakup

indikator kualitatif (keberlanjutan, transparansi, dan efektivitas) dan kuantitatif (keuangan) (Noordin, Haron dan Kassim, 2017).

Kegiatan inti wakaf harus dimasukkan dalam indeks wakaf, meliputi: i) input wakaf, yaitu aset wakaf; ii) hasil wakaf yang dapat berupa kegiatan atau produk; dan iii) dampak sosial dari program wakaf. Selain itu, prinsip tata kelola dan akuntabilitas yang baik juga harus dimasukkan ke dalam indeks (Noordin, Haron dan Kassim, 2017). Indeks Wakaf Nasional yang diusulkan oleh penelitian ini dirancang untuk memenuhi kriteria indeks wakaf yang baik di atas.

2.3 Indeks Wakaf Nasional

Indeks Wakaf Nasional adalah indeks yang dirancang untuk menjadi suatu instrumen atau alat untuk mengukur kinerja wakaf pada di suatu wilayah dari berbagai dimensi pengukuran. Sukmana et al. (2020) membangun model Indeks Wakaf Nasional (IWN) sebagai alat untuk mengukur kinerja wakaf di tingkat nasional dan subnasional. Penelitian tersebut menggunakan metode studi pustaka dalam Focus Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh beberapa faktor yang menjadi pilar tolak ukur kinerja wakaf yaitu faktor regulasi (regulation), kelembagaan (institution), proses (process), sistem (system), hasil (outcome), dan dampak (impact). Setiap faktor dalam pengukuran Indeks Wakaf Nasional memiliki indikator masing-masing seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Skema IWN
Sumber : Sukmana et al. (2020)

2.3.1 Faktor regulasi (Regulation Factor)

Faktor regulasi adalah faktor yang berkaitan dengan dukungan strategis pemerintah selaku otoritas terhadap sistem wakaf dan aktivitas perwakafan di wilayah. Faktor regulasi termasuk untuk mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan wakaf dalam berbagai aspek seperti regulasi, alokasi anggaran dan kegiatan, dan lain sebagainya. Faktor ini memiliki tiga sub faktor sebagai berikut.

2.3.1.1 Dukungan Regulasi (Regulation Support)

Dukungan regulasi berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu negara atau wilayah memiliki undang-undang atau peraturan khusus tentang wakaf di dalam yurisdiksinya. Regulasi merupakan infrastruktur dasar yang harus disediakan oleh negara untuk meningkatkan pembangunan wakaf (Azman dan Ali, 2013). Dukungan regulasi ini penting karena jika undang-undang khusus tentang wakaf tidak tersedia, hal tersebut dapat mengganggu penegakan hukum pengelolaan wakaf yang tepat dan memungkinkan adanya potensi praktik syariah yang tidak sesuai dalam pengelolaan wakaf (Zain, Mahadi dan Noor, 2019). Selain itu, kurangnya dukungan regulasi juga menjadi kendala dalam pengembangan properti wakaf (Dafterdar, 2013).

Aspek penting lainnya yang dapat ditangani dengan adanya regulasi wakaf yang baik adalah sengketa harta benda wakaf. Pengawasan oleh negara untuk mencegah perambahan dan pendudukan mauquf hanya dapat ditegakkan jika terdapat kerangka peraturan tentang permasalahan tersebut (Hassan, Alhabshi dan Yusoff, 2017).

2.3.1.2 Dukungan Anggaran (Budget Support)

Dukungan Anggaran berkaitan dengan pertanyaan tentang jumlah nominal dukungan anggaran untuk pengembangan wakaf yang disediakan oleh pemerintah. Kurangnya dukungan anggaran negara akan menjadi kendala bagi pengembangan wakaf yang optimal (Huda et al., 2017; Thaker dan Pitchay, 2018), sementara sebaliknya dengan adanya dukungan anggaran yang optimal maka pengembangan wakaf akan mengarah pada pengembangan yang lebih baik sebagai bagian dari dakwah Islam, bahkan di negara di mana umat Islam adalah minoritas (Zain, Mahadi dan Noor, 2019).

2.3.1.3 Dukungan Pelatihan (Training Support)

Dukungan Pelatihan berkaitan dengan pertanyaan tentang frekuensi pelatihan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para mutawalli (pengelola wakaf) untuk meningkatkan keterampilan manajemen wakaf. Profesionalisme adalah isu umum yang diangkat oleh berbagai penelitian, seperti Huda et al., (2017) dan Mutalib dan Maamor (2016), pelatihan adalah solusi untuk meningkatkan profesionalisme para pengelola wakaf. Pelatihan juga penting bagi mutawalli untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan wakaf, termasuk memperoleh dana untuk operasi bisnis (Abduh, 2019), pemahaman tugas dan tanggung jawab (Mutalib dan Maamor, 2016), dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset wakaf (Hassan, Alhabshi dan Yusoff, 2017).

2.3.2 Faktor Kelembagaan (Institution Factor)

Faktor kelembagaan merupakan faktor yang terkait dengan kondisi kelembagaan pengelola wakaf (mutawalli) di suatu wilayah. Faktor ini termasuk untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga wakaf dan mentransformasi pengelolaan aset wakaf dari mutawalli individu menjadi mutawalli kelembagaan untuk menjamin profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Faktor ini memiliki dua sub faktor sebagai berikut:

2.3.2.1 Kualitas Manajemen Mutawalli (Muwalli Management Quality)

Kualitas manajemen mutawalli berkaitan dengan pertanyaan tentang berapa banyak lembaga wakaf di suatu wilayah hukum yang telah disertifikasi dengan sertifikasi mutu manajemen, seperti ISO 9001. Sub faktor ini penting karena salah satu faktor yang sering ditemukan sebagai kendala untuk menarik orang berdonasi wakaf adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas mutawalli (Azman dan Ali, 2016; Huda et al., 2017). Jika sertifikasi mutu manajemen diambil dengan hati-hati oleh lembaga wakaf, kepercayaan orang dan otoritas dapat dicapai (Karim, 2010).

2.3.2.2 Status Mutawalli (Mutawalli Status)

Status mutawalli berkaitan dengan pertanyaan tentang berapa banyak mutawalli institusi yang ada di suatu wilayah yurisdiksi, dibandingkan dengan mutawalli individu. Pada hakikatnya, wakaf ada untuk menata dan melembagakan amal (Gebara, 2018).

Ini menyiratkan bahwa seseorang yang mengelola wakaf harus menjadi institusi, bukan individu. Status mutawalli individu berkemungkinan akan menyebabkan pengelolaan wakaf tidak efektif, karena mutawalli menangani berbagai masalah wakaf seperti sertifikasi hukum, pengumpulan dan pengelolaan aset, dan distribusi manfaat kepada penerima manfaat (Huda et al., 2017; Abu Thalib, Abdul Latiff dan Aman, 2020). Tren terkini juga menunjukkan bahwa mutawalli lembaga lebih menarik karena sebuah lembaga tunduk pada akuntabilitas yang akan memberikan kepastian lebih pada aspek-aspek penting seperti kejujuran, transparansi, dan keterampilan manajemen para mutawalli (Abdullah, 2015).

2.3.3 Faktor Proses (Process Factor)

Faktor Proses merupakan faktor yang terkait dengan proses bisnis praktek wakaf. Faktor ini termasuk untuk memastikan pemantauan perkembangan wakaf di suatu wilayah hukum dan untuk meningkatkan pencatatan kegiatan usaha wakaf oleh mutawalli, seperti pengumpulan aset wakaf, surplus pemanfaatan aset wakaf, dan untuk meningkatkan pelaporan keuangan lembaga wakaf kepada otoritas dan masyarakat dengan akuntansi dan standar syariah yang tepat. Faktor ini memiliki tiga sub faktor sebagai berikut:

2.3.3.1 Pengumpulan (Collection)

Pengumpulan berkaitan dengan pertanyaan tentang jumlah harta wakaf atau pokok yang dikumpulkan oleh semua mutawalli dalam suatu wilayah hukum, apakah itu berupa tanah, uang tunai, atau golongan harta lainnya. Penting bagi mutawalli untuk mencatat aset yang mereka kelola karena kurangnya database tersebut dapat menyebabkan aset terbengkalai atau ada kemungkinan perambahan ilegal (Hassan, Alhabshi dan Yusoff, 2017; Zain, Mahadi dan Noor, 2019). Pengumpulan wakaf bersifat sukarela dan kemampuan mutawalli untuk meningkatkan pengumpulan wakaf merupakan cerminan kepercayaan masyarakat terhadap mutawalli (Sadeq, 2002).

2.3.3.2 Pengelolaan (Management)

Pengelolaan berkaitan dengan pertanyaan tentang jumlah keuntungan atau surplus yang dihasilkan oleh semua mutawalli dalam suatu yurisdiksi. Aset wakaf yang telah dikumpulkan oleh mutawalli tidak hanya dibiarkan menganggur, tetapi harus diinvestasikan

dalam setiap kegiatan produktif sesuai dengan syariah Islam (Sadeq, 2002; Mohammad, 2015; Azman dan Ali, 2016). Keuntungan atau surplus inilah yang menjadi dasar bagi manfaat dan pelayanan yang diberikan oleh mutawalli kepada masyarakat umum (Zain, Mahadi dan Noor, 2019). Jika mutawalli di suatu yurisdiksi dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan/surplus dibandingkan dengan yurisdiksi lain, itu merupakan sinyal dari pengelolaan wakaf yang lebih efisien di yurisdiksi sebelumnya (Hassan, Alhabshi dan Yusoff, 2017).

2.3.3.3 Pelaporan (Reporting)

Pelaporan berkaitan dengan pertanyaan tentang jumlah mutawalli kelembagaan yang melaporkan kegiatan dan kondisi keuangannya kepada otoritas wakaf. Pelaporan merupakan bagian penting dari kegiatan wakaf untuk menjaga kepercayaan wakaf dan masyarakat umum terhadap sistem wakaf (Abduh, 2019) serta sebagai alat monitoring untuk memastikan keberlanjutan kondisi keuangan wakaf (Sulaiman dan Alhaji Zakari, 2019). Selain itu, mutawalli harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang mereka lakukan dalam mengelola wakaf karena hubungan kontraktual antara wakif dan mutawalli pada dasarnya adalah amanah. Pelaporan yang tidak tepat, apalagi tidak adanya pelaporan, akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan dari masyarakat umum terhadap mutawalli (Abd Jalil, Yahya and Allah Pitchay, 2019). Penting juga bagi mutawalli untuk melakukan pelaporan secara tepat waktu dan standar (Hassan, Alhabshi dan Yusoff, 2017). Dalam konteks ini, standar akuntansi khusus untuk lembaga wakaf juga penting untuk mengakomodasi pelaporan kegiatan wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah (Ihsan dan Mohamed Ibrahim, 2011; Masruki dan Shafii, 2013; Azmi dan Hanifa, 2015; Ihsan et al. , 2017).

2.3.4 Faktor Sistem (System Factor)

Faktor Sistem berkaitan dengan aspek-aspek yang tidak terkait langsung dengan proses bisnis wakaf tetapi penting untuk mendukung proses tersebut. Faktor sistem termasuk untuk memastikan bahwa aspek-aspek pendukung pengelolaan wakaf diperhatikan dengan baik oleh otoritas wakaf dan mutawalli. Ini termasuk pendaftaran tanah wakaf, kepatuhan dengan syariah, dan penyediaan informasi wakaf kepada publik. Faktor ini memiliki tiga sub faktor sebagai berikut:

2.3.4.1 Legalitas Tanah Wakaf (Sharia Compliance)

Status hukum tanah wakaf berkaitan dengan pertanyaan tentang bagian tanah wakaf bersertifikat yang telah disertifikasi secara sah oleh otoritas lokal. Pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf penting untuk meresmikan peralihan kepemilikan dari wakif sebagaimana diatur dalam akad wakaf serta memberikan dasar bagi mutawalli untuk mengelola tanah wakaf. Selain itu, sertifikat wakaf akan memberikan bukti kuat tentang status wakaf tanah dan mencegah perselisihan, pendudukan ilegal, dan perambahan (Anwar, 2020; Zain, Mahadi dan Noor, 2019).

2.3.4.2 Kepatuhan syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan Syariah berkaitan dengan pertanyaan tentang proporsi lembaga wakaf di yurisdiksi yang memiliki ulama syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mutawalli, serta memastikan apakah aturan syariah diterapkan atau tidak. Sebagian besar (jika tidak semua) studi tentang wakaf setuju bahwa penerapan prinsip syariah merupakan persyaratan mendasar untuk pengelolaan wakaf yang tepat (Ihsan dan Mohamed Ibrahim, 2011; Masruki dan Shafii, 2013; Azmi dan Hanifa, 2015; Ihsan et al., 2017) dan akuntansi wakaf yang terstandarisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf (Abu Thalib, Abdul Latiff dan Aman, 2020).

2.3.4.3 Manajemen Informasi Publik (Public Information Management)

Manajemen informasi publik berkaitan dengan pertanyaan tentang saluran atau media mana yang digunakan oleh otoritas wakaf untuk menginformasikan kegiatannya kepada publik, apakah itu situs web internal atau media eksternal. Hal ini penting karena dikhawatirkan masih terbatasnya kesadaran dan pengetahuan umat Islam tentang wakaf, dan umumnya hanya dipahami sebagai sumbangan keagamaan ke masjid-masjid (Hassan, Alhabshi dan Yusoff, 2017; Gebara, 2018). Oleh karena itu, otoritas wakaf harus menginformasikan setiap kegiatan dan pencapaian lembaga wakaf dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat umum dan membuka peluang bagi calon wakaf (Adewale et al., 2012; Huda et al., 2017; Abu Thalib, Abdul Latiff dan Aman, 2020).

2.3.5 Faktor Hasil (Outcome Factor)

Faktor hasil berkaitan dengan produktivitas wakaf dan jangkauan manfaat wakaf. Faktor hasil termasuk untuk meningkatkan kepedulian terhadap wakaf produktif dan jangkauan penerima manfaat wakaf. Faktor ini akan menjadi tolak ukur keberlanjutan dan inklusivitas program wakaf. Faktor ini memiliki dua sub faktor sebagai berikut:

2.3.5.1 Rasio Wakaf Produktif (Productive Waqf Ratio)

Rasio Wakaf Produktif berkaitan dengan pertanyaan tentang proporsi unit wakaf produktif dalam suatu yurisdiksi atas semua unit wakaf. Keabadian wakaf menyiratkan bahwa harta wakaf harus dikelola untuk menghasilkan pendapatan, yang pada gilirannya akan digunakan untuk membiayai pelayanan umum (Abduh, 2019). Namun, pemahaman yang sempit tentang wakaf membuat banyak aset wakaf yang dikelola hanya bersifat keagamaan dan tidak produktif (Gebara, 2018). Wakaf produktif berarti memasukkan aspek komersial ke dalam pengelolaan wakaf dan transformasi menjadi pengelolaan yang lebih profesional (Winarsih, Masrifah dan Umam, 2019).

2.3.5.2 Jangkauan Penerima Manfaat (Recipients Outreach)

Jangkauan penerima manfaat berkaitan dengan pertanyaan tentang proporsi penerima wakaf (mauquf alaih) dari total populasi di suatu yurisdiksi. Wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan diharapkan dapat menjangkau sebagian besar penduduk dengan layanan esensial, dan khususnya orang miskin, yang membutuhkan, dan yang kekurangan (Azman dan Ali, 2016; Hassan, Alhabshi dan Yusoff, 2017; Zain, Mahadi dan Noor, 2019). Oleh karena itu, sub faktor ini juga merupakan indikator yang baik untuk mengukur kinerja wakaf, karena seorang mutawalli tidak hanya mengelola aset wakaf, tetapi juga mengelola program dan layanan untuk penerima manfaat (Karim, 2010; Ihsan et al., 2017).

2.3.6 Faktor Dampak Faktor (Impact Factor)

Faktor dampak adalah faktor yang berhubungan dengan dampak wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Faktor ini dimaksudkan untuk mengukur dampak program wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat serta luasnya pelayanan sosial dan keagamaan yang diberikan melalui wakaf. Faktor inilah yang menjadi tolak ukur yang memungkinkan terjadinya

transformasi pengelolaan wakaf dan program menjadi lebih “berorientasi dampak”. Faktor ini memiliki empat sub-faktor, dengan tiga yang pertama sub-faktor tersebut terinspirasi dari Indeks Zakat Nasional Indonesia. Sub-faktornya adalah sebagai berikut:

2.3.6.1 Indeks Kesejahteraan CIBEST (CIBEST Welfare Index)

Indeks Kesejahteraan CIBEST merupakan indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data rumah tangga untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan kondisi kemiskinan yaitu materi dan kemiskinan rohani. Indeks Kesejahteraan CIBEST dihitung dengan membagi jumlah keluarga tanpa kemiskinan material atau spiritual (keluarga sejahtera) dibagi dengan jumlah rumah tangga yang diamati (Beik dan Arsyianti, 2016; Puskas BAZNAS, 2016).

2.3.6.2 Indeks Pembangunan Manusia yang Dimodifikasi (Modified Human Development Index)

Indeks Pembangunan Manusia yang Dimodifikasi mengukur indeks kesehatan dan pendidikan yang merupakan bagian dari IPM dengan modifikasi sebagai proxy untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal kesehatan dan pendidikan (Puskas BAZNAS, 2016). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

IPM yang dimodifikasi = $(0,5 \times \text{indeks pendidikan}) + (0,5 \times \text{indeks kesehatan})$

2.3.6.3 Indeks Kemandirian (Independency Index)

Indeks Kemandirian adalah indeks yang mengukur proporsi jam kerja penerima manfaat yang memiliki pendapatan tetap, tabungan, dan usaha. Hal ini juga terinspirasi dari Indeks Zakat Nasional Indonesia (Puskas BAZNAS, 2016).

2.3.6.4 Infrastruktur Wakaf (Waqf Infrastructure)

Sub-faktor Infrastruktur Wakaf berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana wakaf dapat menyediakan infrastruktur yang mendukung layanan esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Layanan tersebut meliputi: keagamaan (masjid), pendidikan (sekolah), dan kesehatan (rumah sakit) dengan pertimbangan proporsi kuantitas dan kapasitas infrastruktur berbasis wakaf dari keseluruhan infrastruktur yang ada dalam suatu yurisdiksi.

Sub-faktor ini merupakan indikator penting bagi kemampuan wakaf untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat umum karena banyak penulis menyatakan bahwa wakaf jika dikelola secara optimal dapat membiayai pelayanan bagi masyarakat umum untuk kebutuhan rohani dan jasmani (Hassan, Alhabshi dan Yusoff, 2017; Gebara, 2018; Abduh, 2019).

Nilai	Kategori
<0,1	Sangat Kurang
≥0,1 dan <0,15	Kurang
≥0,15 dan <0,3	Cukup
≥0,3 dan <0,4	Baik
≥0,4	Sangat Baik

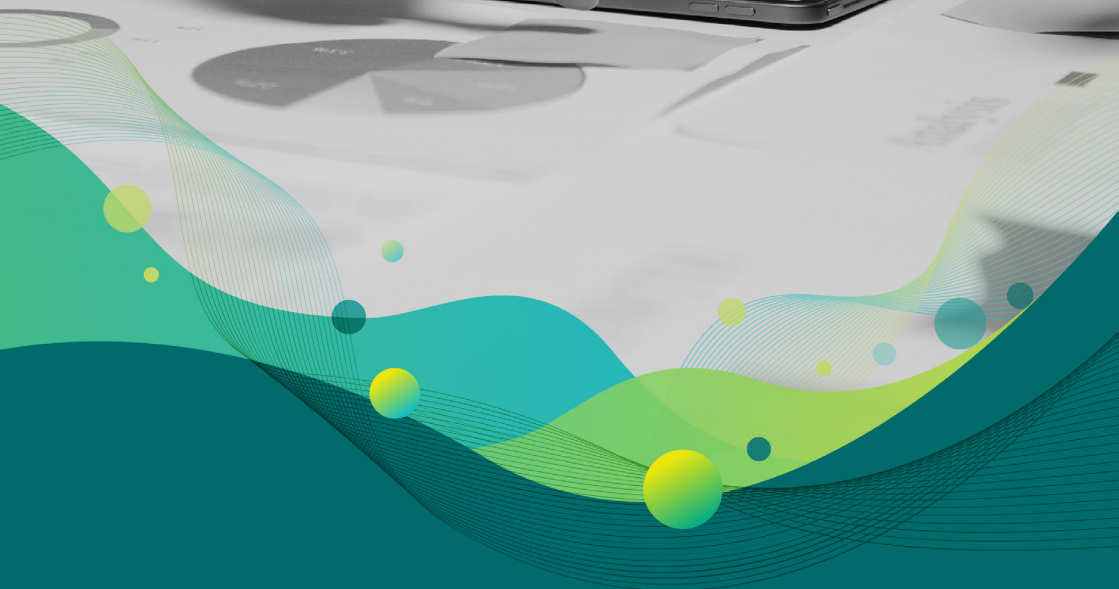
Tabel 2 Kategori Nilai Indeks Wakaf Nasional

2.3.7 Penelitian Terdahulu

Sukmana (2020) menganalisis penerapan IWN pada 34 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu studi pustaka dan FGD untuk penggalan kerangka indeks serta Analytical Hierarchy Processing (AHP) untuk konstruksi indeks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IWN di Indonesia yaitu 0.123 atau kategori kurang. Sedangkan pada tingkat sub-nasional terdapat 5 provinsi dengan kinerja wakaf terbaik yaitu Aceh (nilai IWN 0.36 atau kategori baik), Lampung (nilai IWN 0.27 atau kategori cukup), Bali (nilai IWN 0.191 atau kategori cukup), Sulawesi Tenggara (nilai IWN 0.188 atau kategori cukup), dan Jawa Tengah (nilai IWN 0.16 atau kategori cukup).

BAB 3

Metode Penelitian



BAB 3 - METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menghitung Indeks Wakaf Nasional (IWN) untuk mengukur kinerja wakaf di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari kuesioner yang disebar dan diisi oleh BWI provinsi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai website sistem informasi, seperti SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kementerian Agama, SIMAS (Sistem Informasi Masjid) Kementerian Agama, dan Kemendikbud, SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) Kementerian Kesehatan. Perhitungan IWN dilakukan dengan Multi-stage Weighted Index dengan 6 faktor dan masing-masing faktor memiliki beberapa sub-faktor. Adapun langkah perhitungan Indeks Wakaf Nasional adalah sebagai berikut.

1. Perhitungan nilai aktual (rasio atau likert) dari sub-sektor.
2. Untuk nilai yang berskala likert, angka yang diperoleh akan “diindekskan” dengan rumus berikut.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum}}{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}$$

a. Adapun untuk nilai rasio, maka nilai aktual dipertahankan

3. Nilai yang telah diperoleh dari proses di atas akan dikalikan dengan bobot sub-faktor untuk mendapat nilai indeks faktor IWN.
4. Nilai indeks faktor IWN akan dikalikan dengan bobot masing-masing faktor untuk mendapatkan nilai keseluruhan IWN
5. Bobot pada masing-masing faktor dan subfaktor IWN diperoleh melalui proses expert judgement dan dianalisis dengan metode Analytical Hierarchical Processing (AHP)
6. Minimum score: 0, maximum score: 1

3.1 Penilaian Faktor Regulasi (Regulation Factor)

3.1.1 Dukungan regulasi (X1.1)

Dengan pengukuran skala likert sebagai berikut:

- ◆ 1 : Tidak ada regulasi terkait pengelolaan wakaf
- ◆ 3 : Terdapat regulasi non peraturan daerah terkait pengelolaan wakaf (peraturan gubernur, peraturan bupati, surat edaran, dan lain sebagainya)
- ◆ 5 : Terdapat peraturan daerah di tingkat provinsi dan/atau peraturan yang mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan/atau kepemimpinan yang efektif dalam pengelolaan wakaf

3.1.2 Dukungan Anggaran Pemerintah (X1.2)

Dengan pengukuran skala likert sebagai berikut:

- ◆ 1 : Rasio pembiayaan APBD terhadap biaya operasional BWI daerah ialah <20% atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 2 : Rasio pembiayaan APBD terhadap biaya operasional BWI daerah ialah 20% - <30%
- ◆ 3 : Rasio pembiayaan APBD terhadap biaya operasional BWI daerah ialah 30% - <50%
- ◆ 4 : Rasio pembiayaan APBD terhadap biaya operasional BWI daerah ialah 50% - <75%
- ◆ 5 : Rasio pembiayaan APBD terhadap biaya operasional BWI daerah ialah $\geq 75\%$

3.1.3 Dukungan Pembinaan oleh Otoritas (X1.3)

Otoritas yang dimaksud adalah Kemenag dan/atau BWI, dengan pengukuran skala likert sebagai berikut:

- ◆ 1 : Otoritas tidak pernah melakukan pembinaan kepada nazhir wakaf atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 3 : Otoritas menyelenggarakan pembinaan kepada nazhir wakaf sebanyak 1 - 2 kali dalam satu tahun
- ◆ 5 : Otoritas menyelenggarakan pembinaan kepada nazhir wakaf sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali dalam satu tahun

3.2 Penilaian Faktor Kelembagaan (Institution Factor)

3.2.1 Kualitas Manajemen Mutawalli (X2.1)

Dengan pengukuran skala likert sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nazhir institusi dengan sertifikat ISO}}{\text{Jumlah nazhir institusi}} \times 100\%$$

- ◆ 1 : Terdapat 0%-1% nazhir institusi dengan sertifikat ISO atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 2 : Terdapat >1%-10% nazhir institusi dengan sertifikat ISO
- ◆ 3 : Terdapat >10%-20% nazhir institusi dengan sertifikat ISO
- ◆ 4 : Terdapat >20%-50% nazhir institusi dengan sertifikat ISO
- ◆ 5 : Terdapat >50% nazhir institusi dengan sertifikat ISO

3.2.2 Status Mutawalli (X2.2)

Dengan pengukuran skala likert sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nazhir institusi}}{\text{Jumlah nazhir perorangan} + \text{nazhir institusi}} \times 100\%$$

- ◆ 1 : Terdapat 0%-1% nazhir institusi dari seluruh nazhir di wilayah tersebut atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 2 : Terdapat >1%-10% nazhir institusi dari seluruh nazhir di wilayah tersebut
- ◆ 3 : Terdapat >10%-20% nazhir institusi dari seluruh nazhir di wilayah tersebut
- ◆ 4 : Terdapat >20%-50% nazhir institusi dari seluruh nazhir di wilayah tersebut
- ◆ 5 : Terdapat >50% nazhir institusi dari seluruh nazhir di wilayah tersebut

3.3 Penilaian Faktor Proses (Process Factor)

3.3.1 Pengumpulan (X3.1)

Indikator pengumpulan berkaitan dengan akumulasi aset wakaf yang dikumpulkan oleh nazhir wakaf. Indikator ini melalui sub indikator yang masing-masing diukur dengan skala likert sebagai berikut:

a. Aset Wakaf Tanah

- ◆ 1 : Terdapat tanah wakaf seluas ≤ 1.000 ha di wilayah tersebut atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 2 : Terdapat tanah wakaf seluas $>1.000 - 3.000$ ha di wilayah tersebut
- ◆ 3 : Terdapat tanah wakaf seluas $>3.000 - 5.000$ ha di wilayah tersebut
- ◆ 4 : Terdapat tanah wakaf seluas $>5.000 - 10.000$ ha di wilayah tersebut
- ◆ 5 : Terdapat tanah wakaf seluas >10.000 ha di wilayah tersebut

b. Valuasi Aset Wakaf non-Tanah

- ◆ 1 : Valuasi aset wakaf non-tanah senilai \leq Rp 1 miliar di wilayah tersebut
- ◆ 2 : Valuasi aset wakaf non-tanah senilai $>$ Rp 1 miliar - Rp 10 miliar di wilayah tersebut
- ◆ 3 : Valuasi aset wakaf non-tanah senilai $>$ Rp 10 miliar - Rp 20 miliar di wilayah tersebut
- ◆ 4 : Valuasi aset wakaf non-tanah senilai $>$ Rp 20 miliar - Rp 50 miliar di wilayah tersebut
- ◆ 5 : Valuasi aset wakaf non-tanah senilai $>$ Rp 50 miliar di wilayah tersebut

3.3.2 Pengelolaan (X3.2)

Indikator pengelolaan berkaitan dengan tingkat laba atau surplus pengelolaan wakaf oleh nazhir. indikator ini diukur dengan skala likert sebagai berikut:

- ◆ 1 : Tingkat laba/surplus pengelolaan wakaf yaitu sebesar ≤Rp 500 juta dalam satu tahun atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 2 : Tingkat laba/surplus pengelolaan wakaf yaitu sebesar >Rp 500 juta - Rp 3 miliar dalam satu tahun
- ◆ 3 : Tingkat laba/surplus pengelolaan wakaf yaitu sebesar >Rp 3 miliar - Rp 10 miliar dalam satu tahun
- ◆ 4 : Tingkat laba/surplus pengelolaan wakaf yaitu sebesar >Rp 10 miliar - Rp 50 miliar dalam satu tahun
- ◆ 5 : Tingkat laba/surplus pengelolaan wakaf yaitu sebesar >Rp 50 miliar dalam satu tahun

3.3.3 Pelaporan (X3.3)

Pelaporan berkaitan dengan kualitas pelaporan oleh nazhir wakaf institusi, dengan proksi berupa laporan nazhir yang teraudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Indikator pelaporan diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah laporan nazhir institusi teraudit KAP}}{\text{Jumlah laporan nazhir institusi}} \times 100\%$$

Kemudian hasil perhitungan dari rumus di atas dikategorikan berlandaskan skala likert sebagai berikut

- ◆ 1 : ≤1% laporan nazhir institusi teraudit KAP atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 2 : >1% - 10% laporan nazhir institusi teraudit KAP
- ◆ 3 : >10% - 20% laporan nazhir institusi teraudit KAP
- ◆ 4 : >20% - 50% laporan nazhir institusi teraudit KAP
- ◆ 5 : >50% laporan nazhir institusi teraudit KAP

3.4 Penilaian Faktor Sistem (System Factor)

3.4.1 Legalitas Wakaf Tanah (X4.1)

Legalitas tanah wakaf berkaitan dengan tingkat sertifikasi tanah wakaf. Indikator ini diukur dengan rasio sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas tanah wakaf tersertifikasi}}{\text{Luas tanah wakaf}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dikelompokkan berlandaskan skala likert sebagai berikut

- ◆ 1 : Sebanyak ≤1% lahan wakaf telah tersertifikasi atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 2 : Sebanyak >1% - 10% lahan wakaf telah tersertifikasi
- ◆ 3 : Sebanyak >10% - 20% lahan wakaf telah tersertifikasi
- ◆ 4 : Sebanyak >20% - 50% lahan wakaf telah tersertifikasi
- ◆ 5 : Sebanyak >50% lahan wakaf telah tersertifikasi

3.4.2 Kepatuhan Syariah (X4.2)

Kepatuhan syariah berkaitan dengan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada nazhir institusi. Indikator ini diukur dengan rasio sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nazhir institusi dengan DPS}}{\text{Jumlah nazhir institusi}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dikelompokkan berlandaskan skala likert sebagai berikut

- ◆ 1 : Terdapat <70% nazhir institusi memiliki DPS atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 2 : Terdapat 70% - 80% nazhir institusi memiliki DPS
- ◆ 3 : Terdapat 80% - 90% nazhir institusi memiliki DPS
- ◆ 4 : Terdapat 90% - 1000% nazhir institusi memiliki DPS
- ◆ 5 : Terdapat 1000% nazhir institusi memiliki DPS

3.4.3 Manajemen Informasi Publik (X4.3)

Manajemen Informasi publik berkaitan dengan penyediaan informasi publik oleh BWI sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 61 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Indikator ini diukur dengan skala likert sebagai berikut :

- ◆ 1 : BWI melakukan publikasi pada media internal (media sosial, website resmi) atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 3 : BWI melakukan publikasi pada media internal dan media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik)
- ◆ 5 : BWI melakukan publikasi pada media internal, media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik), dan media eksternal berbahasa asing (cetak maupun elektronik)

3.5 Penilaian Faktor Hasil (Outcome Factor)

3.5.1 Rasio Wakaf Produktif (X5.1)

Rasio Wakaf Produktif berkaitan dengan perbandingan relatif wakaf produktif terhadap seluruh wakaf. Indikator diukur dengan rasio sebagai berikut :

$$\frac{\text{Aset wakaf produktif}}{\text{Total aset wakaf}} \times 100\%$$

- ◆ 1: Sebanyak $\leq 2\%$ aset wakaf tanah adalah wakaf produktif atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 2: Sebanyak $> 2\% - 4\%$ aset wakaf tanah adalah wakaf produktif
- ◆ 3: Sebanyak $> 4\% - 7\%$ aset wakaf tanah adalah wakaf produktif
- ◆ 4: Sebanyak $> 7\% - 10\%$ aset wakaf tanah adalah wakaf produktif
- ◆ 5: Sebanyak $> 10\%$ aset wakaf tanah adalah wakaf produktif

3.5.2 Jangkauan Mauquf 'Alaih (X5.2)

Jangkauan mauquf alaih berkaitan dengan jangkauan manfaat wakaf kepada masyarakat, indikator ini memiliki dua sub indikator yaitu

a. Rasio headcount mauquf 'alaih

$$\frac{\text{Jumlah mauquf alaih}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan di atas kemudian dikategorikan dalam skala likert sebagai berikut :

- ◆ 1 : mauquf 'alaih mencapai $\leq 1\%$ dari penduduk atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ 2 : mauquf 'alaih mencapai $> 1\% - 2\%$ dari penduduk
- ◆ 3 : mauquf 'alaih mencapai $> 2\% - 3\%$ dari penduduk
- ◆ 4 : mauquf 'alaih mencapai $> 3\% - 4\%$ dari penduduk
- ◆ 5 : mauquf 'alaih mencapai $> 4\%$ dari penduduk

b. Pertumbuhan mauquf 'alaih

- ◆ 1 : mauquf 'alaih mencapai $\leq 10\%$ dalam setahun
- ◆ 2 : mauquf 'alaih mencapai $> 10\% - 20\%$ dalam setahun
- ◆ 3 : mauquf 'alaih mencapai $> 20\% - 30\%$ dalam setahun
- ◆ 4 : mauquf 'alaih mencapai $> 30\% - 40\%$ dalam setahun
- ◆ 5 : mauquf 'alaih mencapai $> 40\%$ dalam setahun

3.6 Penilaian Faktor Dampak (Impact Factor)

3.6.1 Indeks Kesejahteraan CIBEST (X6.1)

Indeks kesejahteraan CIBEST adalah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan berbasis pengumpulan data rumah tangga untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan kondisi kemiskinannya, yaitu kemiskinan material dan spiritual. Indeks kesejahteraan CIBEST dihitung dengan membagi jumlah keluarga yang tidak memiliki kemiskinan material maupun spiritual (keluarga sejahtera) dibagi jumlah rumah tangga yang diamati

3.6.2 Modifikasi IPM (X6.2)

Indikator ini mengukur indeks kesehatan dan pendidikan yang merupakan bagian dari IPM. rumus perhitungannya yaitu sebagai berikut :

IPM : (0,5 x indeks pendidikan) +(0,5 x indeks kesehatan)

3.6.3 Indeks Kemandirian (X6.3)

Pengukuran indeks kemandirian mauquf a'laih rumah tangga dilakukan dengan melihat apakah mauquf 'alaih rumah tangga memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan. pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga untuk kemudian dilakukan agregasi dan indeksasi nilai.

3.6.4 Infrastruktur (X6.4)

Infrastruktur Wakaf berkaitan dengan porsi infrastruktur wakaf terhadap keseluruhan infrastruktur di suatu wilayah. Terdapat tiga sektor yang menjadi fokus dari indikator ini, yaitu dakwah (masjid), pendidikan (sekolah), dan kesehatan (rumah sakit). Selain itu, terdapat dua sub indikator untuk tiap sektor yaitu

a. Rasio infrastruktur wakaf

$$\frac{\text{Jumlah infrastruktur wakaf}}{\text{Total infrastruktur}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran di atas dikategorikan berlandaskan skala likert sebagai berikut :

- ◆ Sebanyak <5% infrastruktur berasal dari wakaf atau data tidak diketahui atau tersedia
- ◆ Sebanyak 5% - <10% infrastruktur berasal dari wakaf
- ◆ Sebanyak 10% - <15% infrastruktur berasal dari wakaf
- ◆ Sebanyak 15% - <30% infrastruktur berasal dari wakaf
- ◆ Sebanyak $\geq 30\%$ infrastruktur berasal dari wakaf

b. Kapasitas infrastruktur wakaf

$$\frac{\text{Jumlah kapasitas infrastruktur wakaf}}{\text{Total kapasitas infrastruktur}} \times 100\%$$

Kapasitas disini mencakup jama'ah/luas masjid, siswa di sekolah, dan visitasi pasien di rumah sakit. Hasil pengukuran di atas dikategorikan berlandaskan skala likert sebagai berikut

- ◆ Sebanyak <5% dari kapasitas layanan infrastruktur berasal dari wakaf atau data tidak diketahui/tersedia
- ◆ Sebanyak 5% - <10% dari kapasitas layanan infrastruktur berasal dari wakaf
- ◆ Sebanyak 10% - <15% dari kapasitas layanan infrastruktur berasal dari wakaf
- ◆ Sebanyak 15% - <30% dari kapasitas layanan infrastruktur berasal dari wakaf
- ◆ Sebanyak $\geq 30\%$ dari kapasitas layanan infrastruktur berasal dari wakaf

BAB 4

Hasil & Pembahasan

BAB 4 – HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 IWN Nasional

IWN Nasional tahun 2021: **0,139**, meningkat tipis (0,016) dari tahun sebelumnya. IWN Nasional tahun 2020 adalah **0,123**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum data-data yang ada tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. IWN Nasional tahun 2021 dan 2020 masih di dalam kategori yang sama, yaitu kategori **“Kurang”**. Hal ini berarti terdapat banyak hal yang perlu diupayakan agar IWN Nasional meningkat menjadi lebih baik di masa depan.

Perubahan nilai IWN Nasional yang tidak signifikan ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, sebagian data yang digunakan sama dengan data tahun sebelumnya. Data IWN 2021 yang diambil dari SIWAK sama dengan data IWN 2020, seperti data jumlah masjid wakaf, jumlah sekolah wakaf, serta luas tanah wakaf (bersertifikat dan belum bersertifikat). Kedua, dan ini yang tampaknya lebih berpengaruh terhadap perubahan nilai IWN, adalah banyaknya BWI Provinsi yang tidak mengisi kuesioner. **Hanya 6 BWI Provinsi yang mengisi kuesioner.** Tidak mengisi kuesioner menyebabkan kekosongan data yang kemudian berpengaruh kepada hasil IWN setiap provinsi.

Nilai IWN Nasional merupakan nilai rata-rata dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nilai IWN setiap provinsi tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 3 Provinsi diurutkan dari yang tertinggi ke terendah.

No	Provinsi	Nilai IWN 2021	Kategori
1	BALI	0.490	Sangat Baik
2	DKI JAKARTA	0.433	Sangat Baik
3	KALIMANTAN TIMUR	0.412	Sangat Baik
4	JAWA TIMUR	0.339	Baik
5	SUMATERA SELATAN	0.316	Baik
6	ACEH	0.234	Cukup
7	MALUKU	0.211	Cukup
8	JAWA TENGAH	0.125	Kurang
9	SULAWESI TENGGARA	0.111	Kurang
10	KALIMANTAN SELATAN	0.107	Kurang

11	MALUKU UTARA	0.103	Kurang
12	BANGKA BELITUNG	0.102	Kurang
13	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0.099	Sangat kurang
14	BANTEN	0.099	Sangat kurang
15	SUMATERA BARAT	0.095	Sangat kurang
16	NUSA TENGGARA BARAT	0.095	Sangat kurang
17	NUSA TENGGARA TIMUR	0.092	Sangat kurang
18	BENGKULU	0.091	Sangat kurang
19	KALIMANTAN TENGAH	0.091	Sangat kurang
20	KALIMANTAN UTARA	0.091	Sangat kurang
21	KALIMANTAN BARAT	0.086	Sangat kurang
22	LAMPUNG	0.085	Sangat kurang
23	JAMBI	0.080	Sangat kurang
24	PAPUA	0.077	Sangat kurang
25	KEPULAUAN RIAU	0.076	Sangat kurang
26	SULAWESI TENGAH	0.075	Sangat kurang
27	JAWA BARAT	0.074	Sangat kurang
28	SULAWESI UTARA	0.074	Sangat kurang
29	SULAWESI SELATAN	0.073	Sangat kurang
30	SUMATERA UTARA	0.070	Sangat kurang
31	GORONTALO	0.070	Sangat kurang
32	SULAWESI BARAT	0.070	Sangat kurang
33	RIAU	0.054	Sangat kurang
34	PAPUA BARAT	0.036	Sangat kurang
NASIONAL		0.139	Kurang

Tabel 3 Hasil Perhitungan IWN Provinsi dan Nasional tahun 2021

Lima provinsi yang memiliki nilai IWN tertinggi adalah Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana lima provinsi yang memiliki nilai IWN tertinggi adalah Aceh, Lampung, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.

No	Provinsi	Nilai IWN 2020	Kategori	Provinsi	Nilai IWN 2021	Kategori
1	ACEH	0.359	Baik	BALI	0.490	Sangat Baik
2	LAMPUNG	0.267	Cukup	DKI JAKARTA	0.433	Sangat Baik
3	BALI	0.191	Cukup	KALIMANTAN TIMUR	0.412	Sangat Baik
4	SULAWESI TENGGARA	0.187	Cukup	JAWA TIMUR	0.339	Baik
5	JAWA TENGAH	0.158	Kurang	SUMATERA SELATAN	0.316	Baik
6	KALIMANTAN TIMUR	0.148	Kurang	ACEH	0.234	Cukup
7	BANTEN	0.146	Kurang	MALUKU	0.211	Cukup
8	BENGKULU	0.141	Kurang	JAWA TENGAH	0.125	Kurang
9	KALIMANTAN TENGAH	0.140	Kurang	SULAWESI TENGGARA	0.111	Kurang
10	MALUKU UTARA	0.135	Kurang	KALIMANTAN SELATAN	0.107	Kurang
11	PAPUA BARAT	0.131	Kurang	MALUKU UTARA	0.103	Kurang
12	KEPULAUAN RIAU	0.127	Kurang	BANGKA BELITUNG	0.102	Kurang
13	SULAWESI UTARA	0.125	Kurang	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0.099	Sangat kurang
14	KALIMANTAN BARAT	0.119	Kurang	BANTEN	0.099	Sangat kurang
15	MALUKU	0.118	Kurang	SUMATERA BARAT	0.095	Sangat kurang
16	JAWA TIMUR	0.115	Kurang	NUSA TENGGARA BARAT	0.095	Sangat kurang
17	BANGKA BELITUNG	0.111	Kurang	NUSA TENGGARA TIMUR	0.092	Sangat kurang
18	SULAWESI TENGAH	0.111	Kurang	BENGKULU	0.091	Sangat kurang
19	SUMATERA BARAT	0.109	Kurang	KALIMANTAN TENGAH	0.091	Sangat kurang
20	NUSA TENGGARA BARAT	0.101	Kurang	KALIMANTAN UTARA	0.091	Sangat kurang
21	KALIMANTAN SELATAN	0.101	Kurang	KALIMANTAN BARAT	0.086	Sangat kurang
22	DKI JAKARTA	0.099	Sangat kurang	LAMPUNG	0.085	Sangat kurang
23	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0.098	Sangat kurang	JAMBI	0.080	Sangat kurang
24	NUSA TENGGARA TIMUR	0.095	Sangat kurang	PAPUA	0.077	Sangat kurang
25	KALIMANTAN UTARA	0.094	Sangat kurang	KEPULAUAN RIAU	0.076	Sangat kurang
26	JAMBI	0.092	Sangat kurang	SULAWESI TENGAH	0.075	Sangat kurang
27	RIAU	0.090	Sangat kurang	JAWA BARAT	0.074	Sangat kurang
28	SULAWESI BARAT	0.082	Sangat kurang	SULAWESI UTARA	0.074	Sangat kurang
29	JAWA BARAT	0.078	Sangat kurang	SULAWESI SELATAN	0.073	Sangat kurang
30	PAPUA	0.077	Sangat kurang	SUMATERA UTARA	0.070	Sangat kurang

31	SULAWESI SELATAN	0.075	Sangat kurang	GORONTALO	0.070	Sangat kurang
32	SUMATERA SELATAN	0.073	Sangat kurang	SULAWESI BARAT	0.070	Sangat kurang
33	SUMATERA UTARA	0.051	Sangat kurang	RIAU	0.054	Sangat kurang
34	GORONTALO	0.051	Sangat kurang	PAPUA BARAT	0.036	Sangat kurang
Nasional		0.123	Kurang	Nasional	0.139	Kurang

Tabel 4 Hasil Perhitungan IWN Provinsi dan Nasional tahun 2021 dan 2020

Provinsi Aceh yang merupakan peringkat pertama pada tahun 2020 keluar dari lima besar menjadi peringkat ke-enam pada tahun 2021. Hal yang sama terjadi pada Provinsi Lampung yang merupakan peringkat dua pada tahun 2020 menjadi peringkat 22 pada tahun 2021. Lain halnya dengan Provinsi Bali. Provinsi Bali justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tadinya peringkat tiga pada tahun 2020 menjadi peringkat pertama pada tahun 2021.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa Provinsi Aceh dan Provinsi Lampung adalah provinsi yang mengisi kuesioner pada tahun 2020, namun **tidak** mengisi kuesioner pada tahun 2021. Absennya dua provinsi ini dalam pengisian kuesioner menyebabkan kekosongan sebagian data yang pada akhirnya berpengaruh kepada nilai akhir IWN Provinsi masing-masing provinsi. Sementara itu, Provinsi Bali adalah provinsi yang mengisi kuesioner pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini yang menyebabkan Provinsi Bali mampu bertahan di posisi lima besar provinsi dengan nilai IWN tertinggi bahkan menduduki peringkat pertama pada tahun 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa pengisian kuesioner sangat berpengaruh kepada nilai IWN setiap provinsi. Namun sayangnya kebanyakan BWI Provinsi tidak mengisi kuesioner. Pada tahun 2021, hanya enam provinsi yang mengisi kuesioner, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Maluku. **Lima provinsi dengan nilai IWN tertinggi adalah provinsi yang mengisi kuesioner.** Provinsi Maluku yang juga mengisi kuesioner menempati peringkat tujuh pada tahun 2021. Hal ini semakin menegaskan bahwa pengisian kuesioner merupakan tahapan yang berpengaruh pada nilai IWN setiap provinsi.

Terdapat 13 provinsi yang berada pada level “Sangat Kurang” di tahun 2020, bertambah menjadi 22 provinsi pada tahun 2021. Terdapat 16 provinsi yang berada pada level “Kurang” di tahun 2020.

Jumlah ini berkurang menjadi 5 provinsi pada tahun 2021. Terdapat 4 provinsi yang berada pada level “Cukup” di tahun 2020. Jumlah ini berkurang menjadi 2 provinsi pada tahun 2021. Terdapat 1 provinsi yang berada pada level “Baik” di tahun 2020. Jumlah ini bertambah menjadi 2 provinsi pada tahun 2021. Tidak ada provinsi yang mencapai level “Sangat Baik” pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2021, terdapat tiga provinsi yang telah mencapai level tertinggi ini, yaitu Bali, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur (Tabel 5).

Kategori IWN Provinsi	2020	2021
Sangat Kurang	13	22
Kurang	16	5
Cukup	4	2
Baik	1	2
Sangat Baik	0	3

Tabel 5 Jumlah Provinsi pada Kategori IWN tahun 2020 dan 2021

Sebagaimana yang telah dijelaskan IWN tersusun dari enam faktor, yaitu Regulatory, Institution, Process, System, Outcome dan Impact. Faktor-faktor IWN setiap provinsi ini ditampilkan pada Tabel 6. Secara rata-rata nasional, faktor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Institution (0,085) dan Regulatory (0,014). Keempat faktor lainnya, Process, System, Outcome, dan Impact, memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif. Empat provinsi tertinggi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada faktor Regulatory dan Institution.

No	Provinsi	Growth 2020 - 2021						
		IWN	Factors					
			Regulatory	Institution	Process	System	Outcome	Impact
1	BALI	156.48%	0.527	0.778	0.000	0.000	-0.586	-0.095
2	DKI JAKARTA	337.01%	0.343	0.366	0.093	0.079	0.000	-0.214
3	KALIMANTAN TIMUR	178.30%	0.129	0.822	-0.141	0.355	0.000	-0.153
4	JAWA TIMUR	194.44%	0.472	0.411	0.023	-0.119	0.000	0.028
5	SUMATERA SELATAN	333.34%	0.870	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.033
6	ACEH	-34.87%	-0.259	0.000	-0.106	-0.237	0.000	0.100
7	MALUKU	78.47%	0.342	0.000	0.000	-0.078	0.000	0.157
8	JAWA TENGAH	-21.02%	-0.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.062
9	SULAWESI TENGGARA	-40.84%	0.259	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.063

10	KALIMANTAN SELATAN	5.76%	0.000	0.000	0.000	0.079	0.000	-0.121
11	MALUKU UTARA	-23.63%	-0.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.087
12	BANGKA BELITUNG	-7.77%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.173
13	DAERAH ISTIMEWA YOGY- AKARTA	0.83%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015
14	BANTEN	-32.33%	-0.13	0.000	0.000	-0.079	0.000	0.036
15	SUMATERA BARAT	-13.22%	0.000	0.000	0.000	-0.079	0.000	-0.048
16	NUSA TENGGARA BARAT	-6.23%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.129
17	NUSA TENGGARA TIMUR	-3.62%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.062
18	BENGKULU	-35.75%	-0.13	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.276
19	KALIMANTAN TENGAH	35.04%	-0.13	0.000	0.000	-0.079	0.000	-0.009
20	KALIMANTAN UTARA	-3.43%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.065
21	KALIMANTAN BARAT	-27.59%	-0.13	0.000	0.000	0.078	0.000	-0.171
22	LAMPUNG	-68.00%	-0.259	0.000	-0.036	-0.197		-0.046
23	JAMBI	-12.83%	0.000	0.000	0.000	-0.078	0.000	0.000
24	PAPUA	0.46%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
25	KEPULAUAN RIAU	-39.78%	-0.13	0.000	0.000	-0.078	0.000	-0.044
26	SULAWESI SI TENGAH	-32.07%	-0.13	0.000	0.000	0.040	0.000	-0.115
27	JAWA BARAT	-5.55%	-0.13	0.000	1,141	0.000	0.000	0.107
28	SULAWESI UTARA	-40.72%	-0.13	0.000	0.000	-0.078	0.000	-0.035
29	SULAWESI SELATAN	-3.11%	0.000	0.000	0.000	0.039	0.000	-0.161
30	SUMATERA UTARA	37.01%	0.000	0.000	0.000	0.118	0.000	0.005
31	GORONTALO	37.01%	0.000	0.000	0.000	0.118	0.000	0.005
32	SULAWESI BARAT	-14.71%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.245
33	RIAU	-40.31%	0.000	0.000	0.000	-0.236	0.000	0.007
34	PAPUA BARAT	-72.41%	0.000	0.000	0.000	-0.315	0.000	-0.183
NASIONAL		21.89%	0.014	0.085	-0.001	-0.022	-0.047	-0.054

Tabel 6 Hasil Perhitungan IWN Provinsi dan Nasional setiap Faktor dan Pertumbuhan tahun 2020-2021

Tabel 6 juga menampilkan pertumbuhan IWN tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Sebelas provinsi mengalami pertumbuhan positif dan 23 Provinsi mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tiga digit dicapai oleh Provinsi Bali (156,48%), DKI Jakarta (337.01%), Kalimantan Timur (178,3%), Jawa Timur (194,4%), dan Sumatera Selatan (333,3%). Semua provinsi yang mengalami pertumbuhan positif tiga digit mengalami peningkatan pada faktor Regulatory. Sebagai contoh, Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang termasuk dalam kategori “Sangat Kurang” pada tahun 2020. Pada tahun 2021, provinsi ini menjadi termasuk dalam kategori “Baik”, naik tiga level dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan faktor Regulatory yang cukup signifikan dari 0,000 pada tahun 2020, menjadi 0,870 pada tahun 2021.

Demikian pula dengan Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2020, provinsi ini termasuk dalam kategori “Sangat Kurang”. Pada tahun 2021, kategori Provinsi DKI Jakarta melompat ke level tertinggi menjadi “Sangat Baik”. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh peningkatan faktor Regulatory yang cukup signifikan dari 0,000 pada tahun 2020, menjadi 0,343 pada tahun 2021. Faktor Regulatory adalah faktor strategis yang dapat mendongkrak nilai IWN secara signifikan dalam waktu singkat. Dengan metode penilaian IWN yang ada saat ini, adalah mungkin untuk melompat dari kategori paling bawah ke kategori paling atas dalam waktu satu tahun.

Penjelasan lebih detail mengenai IWN setiap provinsi dibahas secara lebih rinci pada Sub-bab 4.2. Pada bagian ini ditampilkan data mentah perhitungan IWN Provinsi tahun 2020 dan 2021. Hal ini diharapkan dapat memperjelas perubahan data perhitungan IWN setiap provinsi dalam dua tahun terakhir, sehingga dapat diketahui sebab-sebab naik atau turunnya setiap faktor IWN yang diperhitungkan.

4.2 IWN Provinsi

1. Bali

Nilai IWN di Provinsi Bali pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 0,490 (sangat baik) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,191 (cukup) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 131.9%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 terdapat peningkatan nilai yang signifikan pada faktor regulatory dan faktor institution. Selain itu, Provinsi Bali termasuk yang konsisten mengisi kuesioner pada tahun 2020 dan juga pada tahun 2021.

Nilai faktor regulatory meningkat disebabkan karena adanya dana operasional BWI daerah pada tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp.100 juta. Selain itu, frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut meningkat menjadi dua kali dalam setahun dibandingkan dengan tahun 2020 hanya satu kali pelatihan dalam setahun.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	5	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	9	unit

I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	100.000.000	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	2	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	26	1	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	1	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	434	1,481	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	186	190,13	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	13.468.850	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	496.779.332	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	186	213,77	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	248	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	248	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	1,450	100	orang
I21	Jumlah penduduk	3.890.787	4.414.400	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,67	0,50	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,46	0,75	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,61	0,58	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	209	647	unit
I26	Jumlah Masjid Total	246	773	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	150	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	196,800	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	57	159	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	272	3,336	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	9,122	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	40,531	770,380	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	30	60	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 7 Nilai data Mentah Provinsi Bali Tahun 2020-2021

Pada faktor institution terdapat peningkatan nilai pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 perhitungan Rasio nazhir institusi ber-ISO dan Rasio nazhir institusi nilainya lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada jumlah nazhir institusi, jumlah

nazhir institusi bersertifikat ISO dan pembagiannya yaitu nilai jumlah nazhir perorangan sama besar yaitu 1 sehingga rasionya 1. Sedangkan pada tahun 2020 pada perhitungan Rasio nazhir institusi ber-ISO dan Rasio nazhir institusi, pembagiannya sangat besar yaitu 26 dan 434 secara berturut-turut. Sehingga hasil perhitungan faktor institution pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

2. DKI Jakarta

Nilai IWN di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 0.433 (sangat baik) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0.099 (sangat kurang) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 337.01%. Hal ini terjadi karena DKI Jakarta melakukan pengisian kuesioner pada tahun 2021 namun pada tahun 2020 tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga pada tahun 2021 data yang didapat lebih lengkap dan indeks yang dihasilkan lebih tinggi. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan nilai pada faktor regulatory, faktor institution dan faktor process.

Nilai faktor regulatory meningkat disebabkan karena adanya dukungan operasional BWI daerah dari APBD yang nilainya Rp. 598,56 juta dan dana operasional BWI daerah pada tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp. 348,26 juta, sedangkan pada tahun 2020 tidak ada data tersebut. Selain itu, frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut meningkat menjadi 1 kali dalam setahun dibandingkan dengan tahun 2020 tidak terdapat data terkait frekuensi pelatihan.

Pada faktor institution terdapat peningkatan nilai pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 perhitungan Rasio nazhir institusi ber-ISO lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilainya 0,571 sedangkan pada tahun 2020 nilainya 0. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada data jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO sedangkan pada perhitungan diperlukan data tersebut karena cara menghitung Rasio nazhir institusi ber-ISO adalah dengan membagi Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO dengan data jumlah nazhir institusi.

Nilai faktor process meningkat disebabkan karena adanya data surplus pengelolaan wakaf pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 tidak ada data tersebut sehingga terdapat peningkatan nilai faktor process.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	6	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	598.560.000	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	348.260.000	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	1	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	35	359	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	205	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	6,595	6,771	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	157	158.58	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	1.000.000	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	1	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	266	272.73	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	135	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	7	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	523	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	10.576.400	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	1,00	0,00	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,50	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,56	0,50	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	5	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	7	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	15	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	25.000.000	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	629	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	274	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	1.528.165	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	164	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 8 Nilai data Mentah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021

3. Kalimantan Timur

Nilai IWN di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang menjadi 0,412 (sangat baik) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,148 (kurang) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 178.3%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan nilai pada faktor regulatory, faktor institution, dan faktor system. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang konsisten mengisi kuesioner pada tahun 2020 dan juga pada tahun 2021.

Nilai faktor regulatory meningkat disebabkan karena pada perhitungan faktor regulatory terdapat salah satu indikator yaitu dukungan pembinaan otoritas yang meningkat pesat dalam hal frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas dimana semula pada tahun 2020 hanya 2 kali dalam setahun menjadi 8 kali dalam setahun pada 2021.

Pada faktor institution terdapat peningkatan nilai faktor ini pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 perhitungan Rasio nazhir institusi, rasionya 1. Sedangkan pada tahun 2020 pada perhitungan Rasio nazhir institusi pembagiannya cukup besar yaitu 562 sedangkan jumlah nazhir institusinya hanya 2. Sehingga hasil perhitungan faktor institution pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

Pada faktor system terdapat peningkatan dikarenakan pada perhitungan Rasio wakaf tanah tersertifikasi BPN pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan perhitungan rasio tahun 2020. Perhitungan Rasio wakaf tanah tersertifikasi BPN dilakukan dengan cara membandingkan Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN dengan Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi) yang mana pada tahun 2021 nilainya 0.308 sedangkan pada tahun 2020 nilainya adalah 0.001.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	1	1	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	10	10	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	200,000,000	100,000,000	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	150,000,000	100,000,000	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	2	8	kali dalam satu tahun

I07	Jumlah nazhir institusi	2	4	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	4	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	562	3,040	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	2,675,903	219.48	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	43,000,000	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	2,321,108,654	711.62	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	3,047,479	3,664,700	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.84	0	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.47	0.50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.64	0.63	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	1,779	unit
I26	Jumlah Masjid Total	3,047	6,266	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	250	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	3,415	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	722,381	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	2	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	42	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 9 Nilai data Mentah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2021

4. Jawa Timur

Nilai IWN di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,339 (baik) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,115 (kurang) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 194.44%. Hal ini terjadi karena Jawa Timur melakukan pengisian kuesioner pada tahun 2021 namun pada tahun 2020 tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga pada tahun 2021 data yang

didapat lebih lengkap dan indeks yang dihasilkan lebih tinggi. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan nilai pada faktor regulatory, faktor institution, faktor process, dan impact.

Nilai faktor regulatory meningkat disebabkan karena adanya dukungan operasional BWI daerah dari APBD yang nilainya Rp. 100 juta dan dana operasional BWI daerah pada tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp. 120 juta, sedangkan pada tahun 2020 tidak ada kedua data tersebut. Selain itu, frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut meningkat menjadi 3 kali dalam setahun dibandingkan dengan tahun 2020 tidak terdapat data terkait frekuensi pelatihan.

Pada faktor institution terdapat peningkatan nilai pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2021 perhitungan Rasio nazhir institusi ber-ISO lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilainya 0,14 sedangkan pada tahun 2020 nilainya 0. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 tidak ada data jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO sedangkan pada perhitungan diperlukan data tersebut karena cara menghitung Rasio nazhir institusi ber-ISO adalah dengan membagi Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO dengan data jumlah nazhir institusi.

Nilai faktor process meningkat disebabkan karena adanya peningkatan luas lahan wakaf bersertifikasi BPN pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dari 2.264 ha menjadi 2.363.01 ha pada tahun 2021.

Pada faktor impact, nilai modifikasi IPM pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,50 dibandingkan tahun 2020 nilainya 0,43. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat data jumlah masjid wakaf dan jumlah masjid total sehingga rasio masjid wakaf dapat diukur yaitu 0,33. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada data jumlah masjid wakaf maupun data jumlah masjid total.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	1	1	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	38	38	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	100.000.000	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	120.000.000	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	3	kali dalam satu tahun

I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	50	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	7	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	66,929	73,583	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	2,264	2.363,01	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	1	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	4,399	4.839,24	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	7	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	20,000	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	39.955.900	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,71	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,43	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,60	0,60	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	49,189	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	146,976	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	15.000.000	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	20.000.000	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	11,849	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	41,010	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	7,000	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	5.248.198	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	20	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	342	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 10 Nilai data Mentah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021

5. Sumatera Selatan

Nilai IWN di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0.316 (baik) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0.073 (sangat kurang) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 333.34%. Hal ini terjadi karena Sumatera Selatan melakukan pengisian kuesioner pada tahun 2021 namun pada tahun 2020 tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga

pada tahun 2021, data yang didapat lebih lengkap dan indeks yang dihasilkan lebih tinggi. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan nilai pada faktor regulatory.

Nilai faktor regulatory meningkat disebabkan karena adanya dukungan operasional BWI daerah dari APBD yang nilainya Rp. 100 juta dan dana operasional BWI daerah pada tahun 2021 yang nilainya sebesar Rp. 100 juta, sedangkan pada tahun 2020, kedua data tersebut tidak ada. Selain itu, frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut meningkat menjadi 2 kali dalam setahun dibandingkan dengan tahun 2020 tidak terdapat data terkait frekuensi pelatihan.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nlai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	5	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	17	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	100.000.000	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	100.000.000	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	2	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	3,967	4,163	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	147	149,95	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	945	986,45	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	8.600.800	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,94	0,50	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,38	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,55	0,60	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	3,270	unit

I26	Jumlah Masjid Total	N/A	14,614	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	315	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	8,399	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	1.583.144	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	64	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 11 Nilai data Mentah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021

6. Aceh

Nilai IWN di Provinsi Aceh pada tahun 2021 turun menjadi 0,234 (cukup) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,359 (baik) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 34,87%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020, Aceh melakukan pengisian kuesioner sedangkan pada tahun 2021 tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga data-data yang dibutuhkan menjadi tidak ada nilai atau kosong. Pada tahun 2021, terjadi penurunan nilai pada faktor regulatory, faktor process, dan faktor system.

Nilai faktor regulatory menurun disebabkan tidak diketahui data mengenai anggaran dana operasional BWI daerah pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 besaran dana operasional BWI daerah mencapai sebesar Rp. 100 juta. Selain itu, frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut juga tidak ada. Sedangkan pada tahun 2020, frekuensi pelatihan atau pembinaan untuk nazhir yaitu tiga kali dalam setahun.

Pada faktor process terjadi penurunan nilai pada indikator Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN. Pada tahun 2020 Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN Provinsi Aceh adalah 13.981 persil. Sedangkan pada tahun 2021 Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN menjadi 1.157,33.

Pada faktor system terjadi penurunan pada perhitungan Rasio wakaf tanah tersertifikasi BPN. Perhitungan Rasio wakaf tanah tersertifikasi BPN dilakukan dengan cara membandingkan Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN dengan Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi). Pada tahun 2020 nilai rasio wakaf tanah tersertifikasi BPN adalah 0,76 sedangkan pada tahun 2021 nilainya nol.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	5	5	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	23	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	100.000.000	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	3	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	3	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	6,497	17,875	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	13,981	1.157,33	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	18,343	9.630,89	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	42	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	24,358	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	5.388.100	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,81	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,48	0,75	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,50	0,96	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	3,717	11,416	unit
I26	Jumlah Masjid Total	4,137	11,743	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	1,236	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	6,864	unit

I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	864,555	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	65	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 12 Nilai data Mentah Provinsi Aceh Tahun 2020-2021

7. Maluku

Nilai IWN di Provinsi Maluku pada tahun 2021 mengalami kenaikan 0,211 (cukup) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,118 (kurang) atau terjadi kenaikan nilai IWN sebesar 78%. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai pada faktor regulatory, faktor impact, dan penurunan faktor system pada tahun 2021.

Nilai faktor regulatory meningkat disebabkan karena adanya anggaran dana dukungan operasional BWI daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 100 juta Selain itu, frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut meningkat menjadi empat kali dalam setahun dibandingkan dengan tahun 2020 hanya dua kali pelatihan dalam setahun.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nlai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	N/A	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	11	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	100,000,000	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	100,000,000	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	2	4	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	469	469	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	39	38.96	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	0	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)

I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	121	121,36	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	1,787,100	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,75	0,75	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,4	0,64	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	356	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	1,902	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	26	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	3,242	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	401,765	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	1	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	23	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 13 Nilai data mentah Provinsi Maluku 2020-2021

Pada faktor system terjadi penurunan nilai pada indikator manajemen informasi publik. Nilai indikator manajemen informasi publik pada tahun 2021 turun menjadi 1 dari yang sebelumnya 3 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa BWI pada wilayah Maluku tidak melakukan publikasi pada media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik) pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada data terkait jumlah nazhir institusi. Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Maluku meningkat menjadi 0,25. Sedangkan pada IWN 2020, tidak ada data untuk nilai indeks kesejahteraan CIBEST. Demikian juga dengan nilai indeks kemandirian yang meningkat dari yang sebelumnya sebesar 0,43 menjadi sebesar 0,64.

8. Jawa Tengah

Nilai IWN di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,125 (kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,158 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 26,4%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020, Lampung melakukan pengisian kuesioner sedangkan pada tahun 2021 Jawa Tengah tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga data-data yang dibutuhkan menjadi tidak ada nilai atau kosong. Pada tahun 2021, terjadi penurunan nilai pada faktor regulatory dan peningkatan pada faktor impact pada tahun 2021.

Nilai faktor regulatory menurun disebabkan tidak adanya anggaran dana dukungan operasional BWI daerah dari yang sebelumnya 100 juta rupiah pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 tidak diketahui data terkait dukungan operasional di provinsi Jawa Tengah. Selain itu, frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut juga tidak ada. Sedangkan pada tahun 2020, frekuensi pelatihan atau pembinaan untuk nazhir yaitu satu kali dalam setahun.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	35	N/A	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	1	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	35	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	108,621	100,244	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	3799	3,651.00	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	N/A	5,118.00	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)

I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	34738200	N/A	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	1	0.80	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	1	0.42	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	1	0.54	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	76817	N/A	unit
I26	Jumlah Masjid Total	140511	N/A	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	14383	N/A	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	31414	N/A	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	5126515	N/A	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	265	N/A	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 14 Nilai data mentah Provinsi Jawa Tengah 2020-2021

Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Jawa Tengah turun menjadi 0,50. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Jawa Tengah mencapai angka 0,80. Namun, nilai indeks kemandirian meningkat dari yang sebelumnya sebesar 0,54 menjadi sebesar 0,60.

9. Sulawesi Tenggara

Nilai IWN di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,111 (kurang) dibandingkan tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,187 (cukup) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 40,84%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020, Sulawesi Tenggara melakukan pengisian kuesioner sedangkan pada tahun 2021 Sulawesi Tenggara tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga data-data yang dibutuhkan menjadi tidak ada nilai atau kosong. Pada tahun 2021, terjadi penurunan nilai pada beberapa faktor regulatory dan faktor impact pada tahun 2021.

Terjadi penurunan pada faktor regulatory hal ini dikarenakan frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi

para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut tidak ada data. Sedangkan pada tahun 2020, frekuensi pelatihan atau pembinaan untuk nazhir yaitu tiga kali dalam setahun. Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Sulawesi Tenggara turun menjadi 0,50. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Sulawesi Tenggara mencapai angka 1,00. Demikian juga dengan nilai indeks kemandirian yang menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,61 menjadi sebesar 0,65.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	N/A	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	17	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	3	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	1	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	1,108	1,110	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	71	71.37	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	102	110.64	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	N/A	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	1.00	1	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.56	0.75	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.65	0.61	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	931	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	4,063	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang

I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	71	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	4,145	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	550,855	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	23	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 15 Nilai data mentah Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2021

10. Kalimantan Selatan

Nilai IWN di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,107 (kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,101 (kurang) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 5,76%. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai pada faktor system dan penurunan faktor impact pada tahun 2021. Pada faktor system terjadi peningkatan nilai pada indikator manajemen informasi publik. Nilai indikator manajemen informasi publik pada tahun 2021 meningkat menjadi 3 dari yang sebelumnya 1 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa BWI pada wilayah Kalimantan Selatan melakukan publikasi pada media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik) pada tahun 2021. Selain itu, tidak terjadi penurunan jumlah nazhir institusi karena tidak ada data terkait jumlah nazhir institusi. Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Kalimantan Selatan turun menjadi 0,25. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Kalimantan Selatan mencapai angka 1,00. Demikian juga dengan nilai indeks kemandirian yang menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,63 menjadi sebesar 0,58.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	13	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit

I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	8,160	8,401	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	831	830.51	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	978	995.21	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	4,286,600	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	1.00	0.25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.50	0.50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.63	0.58	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	5,626	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	10,696	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	1,210	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	4,955	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	615,570	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	41	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 16 Nilai data mentah Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2021

11. Maluku Utara

Nilai IWN di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,103 (kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,135 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 23,63%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020, Maluku Utara melakukan pengisian kuesioner sedangkan pada tahun 2021 Maluku Utara tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga data-data yang dibutuhkan menjadi tidak ada nilai atau kosong.

Pada tahun 2021, terjadi penurunan nilai pada faktor regulatory dan peningkatan pada faktor impact pada tahun 2021.

Nilai faktor regulatory menurun dikarenakan frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tidak ada. Sedangkan pada tahun 2020, frekuensi pelatihan atau pembinaan untuk nazhir yaitu satu kali dalam setahun. Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Maluku Utara naik menjadi 1,00. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Maluku Utara mencapai angka 0,59. Demikian juga dengan nilai indeks kemandirian yang meningkat dari yang sebelumnya sebesar 0,62 menjadi sebesar 0,72.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	5	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	23	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	313	17,875	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	25	1.157,33	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	47	9.630,89	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	5.388.100	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,92	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,30	0,75	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,62	0,96	Nilai Indeks

I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	11,416	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	11,743	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	1,236	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	6,864	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	864,555	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	65	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 17 Nilai data mentah Provinsi Maluku Utara 2020-2021

12. Bangka Belitung

Nilai IWN di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,102 (kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,111 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 7,7%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020, Bangka Belitung melakukan pengisian kuesioner sedangkan pada tahun 2021 Bangka Belitung tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga data-data yang dibutuhkan menjadi tidak ada nilai atau kosong. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan pada faktor system dan penurunan pada faktor impact.

Pada faktor system terjadi peningkatan pada luas tanah bersertifikasi BPN. Pada tahun 2021 luas tanah bersertifikasi BPN menjadi 217,83 hektar dari yang sebelumnya 150,42 hektar pada 2020. Begitu pula dengan luas lahan tanah bersertifikasi dan non-sertifikasi, terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 388,43 hektar dari yang sebelumnya 203,47 hektar.

Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Bangka Belitung turun dikarenakan tidak ada data pada tahun 2021. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Maluku Utara mencapai angka 0,88. Demikian juga dengan nilai indeks kemandirian yang menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,58 menjadi sebesar 0,55.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nlai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	1	1	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	7	7	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	1,089	1,309	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	150	217.83	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	203	388.43	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	1,469,800	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.88	0.00	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.54	0.50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.58	0.55	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	797	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	1,995	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	95	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	1,295	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	276,794	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	20	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 18 Nilai Data Mentah Provinsi Bangka Belitung 2020-2021

13. Daerah Istimewa Yogyakarta

Nilai IWN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan yaitu menjadi 0.099 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,098 (sangat kurang) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 0,83%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengisian kuesioner sedangkan pada tahun 2021 tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga data-data yang dibutuhkan menjadi tidak ada nilai atau kosong. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan pada faktor impact.

Pada faktor system terjadi peningkatan pada luas tanah bersertifikasi BPN. Pada tahun 2021 luas tanah bersertifikasi BPN menjadi 395,45 hektar dari yang sebelumnya 324,46 hektar pada 2020. Begitu pula dengan luas lahan tanah bersertifikasi dan non-sertifikasi, terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 440,74 hektar dari yang sebelumnya 361,82 hektar.

Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta turun dikarenakan pada tahun 2021 menjadi 0,25. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 0,88. Namun, nilai indeks kemandirian yang menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,56 menjadi sebesar 0,66.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	5	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	10	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	10.147	10.820	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	324	395,45	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit

I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	362	440,74	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	3.919.200	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,88	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,50	0,75	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,56	0,66	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	7.840	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	13.940	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	1.270	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	3.055	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	563.104	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	65	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 19 Nilai data mentah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2021

14. Banten

Nilai IWN di Provinsi Banten pada tahun 2021 turun menjadi 0,099 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,146 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 32%. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan pada faktor regulasi (regulatory) dan faktor sistem (system) pada tahun 2021.

Nilai faktor regulasi menurun disebabkan tidak adanya frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut. Sedangkan pada tahun 2020, frekuensi pelatihan atau pembinaan untuk nazhir yaitu satu kali dalam setahun.

Pada faktor sistem (system) terjadi penurunan khususnya pada indikator manajemen informasi publik. Nilai indikator manajemen informasi publik pada tahun 2021 menurun menjadi 1 dari yang sebelumnya 3 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa BWI pada wilayah Banten pada tahun 2021 tidak melakukan publikasi baik pada media internal maupun media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik). Keterbatasan informasi setiap kegiatan dan pencapaian lembaga wakaf ini dapat membatasi pengetahuan masyarakat mengenai wakaf dan peluang bagi calon wakif.

Selain itu, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 Banten turun menjadi 0,50. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST mencapai angka 0,82. Meskipun demikian, nilai modifikasi IPM pada tahun 2021 naik menjadi 0,50 dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0,46, dan indeks kemandirian pada tahun 2021 naik menjadi 0,66 dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0,56.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	8	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	6	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	15,423	16,845	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	553	581	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	1,075	1,138.95	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang

I21	Jumlah penduduk	N/A	12,895,300	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.82	0.55	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.46	0.50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.56	0.66	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	10,698	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	19,937	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	2,193	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	10,223	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	2,036,996	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	95	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 20 Nilai data mentah Provinsi Banten 2020-2021

15. Sumatera Barat

Nilai IWN di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 turun menjadi 0,095 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,109 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 12%. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan nilai pada faktor sistem (system) dan faktor dampak (impact) pada tahun 2021.

Nilai faktor sistem menurun disebabkan menurunnya nilai indikator manajemen informasi publik menjadi 1 pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, nilai indikator manajemen informasi publik sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa BWI pada wilayah Sumatera Barat pada 2021 tidak melakukan publikasi baik pada media internal maupun media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik).

Pada faktor dampak (impact) terjadi penurunan khususnya pada indikator kesejahteraan CIBEST. Nilai indikator kesejahteraan CIBEST pada tahun 2021 menurun menjadi 0,25 dari yang sebelumnya 0,90 pada tahun 2020.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nlai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	19	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	1	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	0	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	5,245	5,879	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	373	414,61	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	599,09	670,20	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	5,545,700	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,90	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,44	0,75	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,52	0,62	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	4,098	unit
I26	Jumlah Masjid Total	4,701	17,489	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	645	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	6,406	6,466	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	631,591	1,065,396	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	78	63	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 21 Nilai data mentah Provinsi Sumatera Barat 2020-2021

16. Nusa Tenggara Barat

Nilai IWN di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 turun menjadi 0,092 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,101 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 8,9%. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan nilai pada faktor dampak (impact) pada tahun 2021. Nilai faktor dampak menurun disebabkan nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di NTB turun menjadi 0,25. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST mencapai angka 0,86.

Meskipun begitu, terjadi peningkatan pada faktor sistem (system) khususnya pada luas lahan wakaf. Luas lahan wakaf pada tahun 2021 meningkat menjadi menjadi 1.546 hektar dari yang sebelumnya 1.361 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya luas lahan yang diperuntukkan untuk wakaf. Banyaknya lahan wakaf ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan berbagai fasilitas umum pada lahan wakaf tersebut.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	10	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	4	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	8,979	9,799	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	868	988.49	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	1,360.64	1,546.83	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit

I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	5,225,900	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.86	0.25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.72	0.50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.63	0.62	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	6,404	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	9,868	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	960	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	7,335	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	855,072	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	32	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 22 Nilai data mentah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2021

17. Nusa Tenggara Timur

Nilai IWN di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 tidak berubah secara signifikan menjadi 0,092 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,095 (sangat kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 3,2%. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan nilai pada faktor dampak (impact) pada tahun 2021.

Nilai faktor dampak menurun disebabkan nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di NTT turun menjadi 0,00. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST mencapai angka 0,82. Meskipun demikian, terjadi peningkatan pada indeks kemandirian pada tahun 2021 menjadi 0,67 dari yang sebelumnya 0,00 pada 2020.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	22	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah

I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	1,307	1,307	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	210	209.90	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	335	335.26	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	5,513,400	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.82	0.00	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.50	0.50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.39	0.67	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	862	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	1,129	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	186	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	8,212	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	1,343,958	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	44	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 23 Nilai data mentah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2021

18. Bengkulu

Nilai IWN di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 turun menjadi 0,091 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,141 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 35%. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan nilai pada faktor

regulasi (regulatory) dan faktor dampak (impact) pada tahun 2021.

Nilai faktor regulasi menurun disebabkan tidak adanya frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut. Sedangkan pada tahun 2020, frekuensi pelatihan atau pembinaan untuk nazhir, yaitu satu kali dalam setahun.

Pada faktor dampak (impact) terjadi penurunan khususnya pada indeks kesejahteraan CIBEST. Nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Bengkulu turun menjadi 0,00. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST mencapai angka 0,94. Demikian juga dengan nilai indeks kemandirian yang menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,56 menjadi sebesar 0,50. Meskipun begitu, terjadi peningkatan pada faktor sistem (system) khususnya pada luas lahan wakaf. Luas lahan wakaf pada tahun 2021 meningkat menjadi 435,46 hektar dari yang sebelumnya 409 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya luas lahan yang diperuntukkan untuk wakaf. Banyaknya lahan wakaf ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan berbagai fasilitas umum pada lahan wakaf tersebut.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	10	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	2,294	2,384	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	235	246,37	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	409	435,46	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit

I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	1,994,300	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.94	0.00	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.56	0.50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.87	0.61	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	1,585	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	4,331	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	178	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	2,402	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	370,390	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	19	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 24 Nilai data mentah Provinsi Bengkulu 2020-2021

19. Kalimantan Tengah

Nilai IWN di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 turun menjadi 0,088 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,140 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 37%. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan nilai pada faktor regulasi (regulatory), faktor sistem (system) dan faktor dampak (impact) pada tahun 2021.

Nilai faktor regulasi menurun disebabkan tidak adanya frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut. Sedangkan pada tahun 2020, frekuensi pelatihan atau pembinaan untuk nazhir yaitu satu kali dalam setahun.

Pada faktor sistem (system) terjadi penurunan khususnya pada indikator manajemen informasi publik. Nilai indikator manajemen informasi publik pada tahun 2021 menurun menjadi 1 dari yang sebelumnya 3 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa BWI

pada wilayah Kalimantan Tengah pada tahun 2021 tidak melakukan publikasi baik pada media internal maupun media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik). Keterbatasan informasi setiap kegiatan dan pencapaian lembaga wakaf ini dapat membatasi pengetahuan masyarakat mengenai wakaf dan peluang bagi calon wakif.

Pada faktor dampak (impact) terjadi penurunan pada indeks kesejahteraan CIBEST. Indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 Kalimantan Tengah turun menjadi 0,25.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	14	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	3,036	3,163	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	340	345.44	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	613	643.77	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	2,686,300	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.50	0.25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.42	0.25	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.47	0.57	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	2,148	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	5,587	unit

I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	409	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	4,406	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	482,383	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	21	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 25 Nilai data mentah Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2021

20. Kalimantan Utara

Nilai IWN di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 tidak berubah secara signifikan menjadi 0,091 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,094 (sangat kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 3,2%. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan nilai pada faktor dampak (impact) pada tahun 2021.

Nilai faktor dampak menurun disebabkan nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Kalimantan Utara turun menjadi 0,00. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST mencapai angka 0,44.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	5	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	424	523	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	99	94,09	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit

I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	137	153,50	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	708,400	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.44	0.00	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.50	0.50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.63	0.59	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	329	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	1,058	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	75	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	839	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	137,643	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	7	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 26 Nilai data mentah Provinsi Kalimantan Utara 2020-2021

21. Kalimantan Barat

Nilai IWN di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 turun menjadi 0,086 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,119 (kurang). Hal ini terjadi karena terjadi penurunan nilai pada faktor regulatory dan faktor impact pada tahun 2021.

Nilai faktor regulatory menurun disebabkan tidak diketahuinya data frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut. Sedangkan pada tahun 2020, frekuensi pelatihan atau pembinaan untuk nazhir yaitu satu kali dalam setahun.

Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Kalimantan Barat turun menjadi 0,25. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST mencapai angka 1,00. Demikian juga dengan nilai indeks kemandirian yang menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,65 menjadi sebesar 0,57.

Meskipun begitu, terjadi peningkatan pada faktor sistem (system) khususnya pada indikator manajemen informasi publik. Nilai indikator manajemen informasi publik pada tahun 2021 meningkat menjadi 3 dari yang sebelumnya hanya 1 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa BWI pada wilayah Kalimantan Barat sudah melakukan publikasi baik pada media internal maupun media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik). Informasi setiap kegiatan dan pencapaian lembaga wakaf ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat serta membuka peluang bagi calon wakif.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	1	1	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	14	14	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	2.697	3.301	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	246	258,90	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	533	692,21	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	5.104.900	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	1,00	0,25	Nilai Indeks

I23	Modifikasi IPM	0,50	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,65	0,57	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	1.787	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	7.374	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	274	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	7.379	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	1.009.188	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	42	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 27 Nilai data mentah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2021

22. Lampung

Nilai IWN di Provinsi Lampung pada tahun 2021 turun menjadi 0,085 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,267 (cukup) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 68%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020, Lampung melakukan pengisian kuesioner sedangkan pada tahun 2021 Lampung tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga data-data yang dibutuhkan menjadi tidak ada nilai atau kosong. Pada tahun 2021, terjadi penurunan nilai pada faktor regulatory, faktor process, faktor system, faktor outcome, dan faktor impact pada tahun 2021.

Nilai faktor regulatory menurun disebabkan tidak diketahui data terkait anggaran dana dukungan operasional BWI daerah pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 besaran dana operasional BWI daerah mencapai sebesar Rp. 100 juta. Selain itu, frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2021 di wilayah tersebut juga tidak diketahui. Sedangkan pada tahun 2020, frekuensi pelatihan atau pembinaan untuk nazhir yaitu tiga kali dalam setahun.

Pada faktor process terjadi penurunan nilai pada indikator valuasi aset wakaf non-tanah serta surplus pengelolaan wakaf. Pada tahun 2020 valuasi aset wakaf non tanah mencapai Rp. 200 juta dan surplus pengelolaan wakaf mencapai Rp. 20 juta. Sedangkan pada tahun

2021, tidak diketahui data baik untuk nilai aset wakaf non-tanah dan surplus pengelolaan wakaf.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	15	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	100.000.000	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	3	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	30	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	5.000	14.067	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	3.200	2.879,11	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	200.000.000	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	20.000.000	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	5.450	5.835,15	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	5.800	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	15.100	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	2.000.000	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	7.600.000	8.543.800	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,66	0,50	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,41	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,61	0,56	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	2.100	9.558	unit
I26	Jumlah Masjid Total	2.600	24.219	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	2.000	1.556	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	8.900	8.998	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	1.442.856	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	5	N/A	unit

I34	Jumlah Rumah Sakit Total	70	64	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 28 Nilai data mentah Provinsi Lampung Tahun 2020-2021

Pada faktor system terjadi penurunan nilai pada indikator manajemen informasi publik. Nilai indikator manajemen informasi publik pada tahun 2021 turun menjadi 1 dari yang sebelumnya 3 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa BWI pada wilayah Lampung tidak melakukan publikasi pada media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik) pada tahun 2021. Selain itu, terjadi penurunan jumlah nazhir institusi yang sebelumnya mencapai 30 unit pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 tidak diketahui data terkait jumlah nazhir institusi.

Pada faktor outcome terjadi penurunan nilai pada indikator rasio wakaf produktif dan rasio mauquf alaih. Pada tahun 2020 unit aset wakaf produktif mencapai 5.800 unit, unit aset wakaf total mencapai 15.100 unit, dan jumlah mauquf alaih mencapai 2 juta orang. Sedangkan pada tahun 2021, tidak diketahui data baik untuk unit aset wakaf produktif, unit aset wakaf total, dan jumlah mauquf alaih.

Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Lampung turun menjadi 0,59. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Lampung mencapai angka 0,66. Demikian juga dengan nilai indeks kemandirian yang menurun dari yang sebelumnya sebesar 0,61 menjadi sebesar 0,56.

23. Jambi

Nilai IWN di Provinsi Jambi pada tahun 2021 turun menjadi 0,080 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,092 (sangat kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 12,83%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan nilai pada faktor regulatory dan faktor system.

Nilai faktor system menurun disebabkan menurunnya indikator rasio wakaf tanah tersertifikasi BPN dan indikator manajemen informasi publik. Pada tahun 2020, luas lahan wakaf tanah bersertifikasi BPN mencapai 444 hektar dan luas lahan lahan wakaf tanah sertifikasi dan sertifikasi mencapai 1.004 hektar. Jika dirasiokan maka luas lahan wakaf tanah bersertifikasi dibandingkan luas lahan wakaf tanah total

yaitu 0,442. Sedangkan pada 2021 luas lahan wakaf tanah bersertifikasi BPN mencapai 458,12 hektar dan luas lahan lahan wakaf tanah sertifikasi dan sertifikasi mencapai 1.072,60 hektar. Jika dirasioikan maka luas lahan wakaf tanah bersertifikasi dibandingkan luas lahan wakaf tanah total yaitu 0,427.

Nilai indikator manajemen informasi publik pada tahun 2021 turun menjadi 1 dari yang sebelumnya 3 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa BWI pada wilayah Jambi tidak melakukan publikasi pada media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik) pada tahun 2021.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	11	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	6.360	6.530	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	444	458,12	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	1.004	1.072,60	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	3.604.200	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,93	0,50	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,48	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,57	0,65	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	4.277	unit
I26	Jumlah Masjid Total	4.027	8.369	unit

I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	817	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	4.49	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	629.437	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	41	32	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 29 Nilai data mentah Provinsi Jambi Tahun 2020-2021

24. Papua

Nilai IWN di Provinsi Jambi pada tahun 2021 turun menjadi 0,077 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,0773 (sangat kurang) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 0,46%. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai pada faktor impact.

Nilai faktor impact meningkat karena tersedianya data jumlah masjid wakaf (193 unit) dan jumlah masjid total (545 unit) yang digunakan untuk perhitungan rasio masjid wakaf serta tersedianya data jumlah sekolah wakaf (22 unit) dan jumlah sekolah total (3.860 unit) yang digunakan untuk perhitungan rasio sekolah wakaf. Sedangkan pada tahun 2020, data-data tersebut tidak diketahui.

Selain itu nilai modifikasi IPM dan indeks kemandirian juga turut meningkat. Modifikasi IPM pada tahun 2021 mencapai sebesar 0,75 dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 0,54. Kemudian indeks kemandirian pada tahun 2021 mencapai sebesar 0,60 dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 0,57. Data-data tersebut meningkatkan faktor impact, meskipun di sisi lain bahwasanya nilai indeks kesejahteraan CIBEST menurun dari 0,63 menjadi 0,25.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	29	unit

I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	287	287	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	19	19,28	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	60	59,97	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	3.393.100	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,63	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,54	0,75	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,57	0,60	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	193	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	545	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	22	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	3.860	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	661.259	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	29	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 30 Nilai data mentah Provinsi Papua Tahun 2020-2021

25. Kepulauan Riau

Nilai IWN di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 turun menjadi 0,076 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,127 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 39,78%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan nilai pada faktor regulatory, faktor system, dan faktor impact.

Nilai faktor regulatory menurun disebabkan menurunnya nilai frekuensi pembinaan nazhir dimana pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1 kali dalam setahun, sedangkan pada 2021 tidak diketahui data terkait frekuensi pembinaan nazhir.

Selanjutnya, nilai faktor system menurun karena nilai indikator manajemen informasi publik pada tahun 2021 turun menjadi 1 dari yang sebelumnya 3 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa BWI pada wilayah Kepulauan Riau tidak melakukan publikasi pada media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik) pada tahun 2021.

Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Kepulauan Riau turun menjadi 0,50. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Kepulauan Riau mencapai angka 0,81. Meskipun demikian, indikator rasio masjid wakaf dan indikator sekolah wakaf meningkat karena tersedianya data jumlah masjid wakaf (1.003 unit) dan jumlah masjid total (1.908.578 unit) yang digunakan untuk perhitungan rasio masjid wakaf serta tersedianya data jumlah sekolah wakaf (157 unit) dan jumlah sekolah total (1.827 unit) yang digunakan untuk perhitungan rasio sekolah wakaf. Sedangkan pada tahun 2020, data-data tersebut tidak diketahui.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	7	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	1.474	1.599	unit

I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	63	75,63	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	310	323,66	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	2.309.500	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,81	0,50	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,44	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,59	0,61	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	1.003	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	1.908.578	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	157	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	1.827	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	396.822	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	29	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 31 Nilai data mentah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2021

26. Sulawesi Tengah

Nilai IWN di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 turun menjadi 0,075 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,111 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 32,07%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan nilai pada faktor regulatory dan faktor impact.

Nilai faktor regulatory menurun disebabkan menurunnya nilai frekuensi pembinaan nazhir dimana pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1 kali dalam setahun, sedangkan pada 2021 tidak diketahui data terkait frekuensi pembinaan nazhir.

Pada faktor impact, nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Sulawesi Tengah turun menjadi 0,25. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Sulawesi Tengah mencapai angka 0,94. Meskipun demikian, nilai indeks kemandirian meningkat menjadi 0,63 dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 0,60.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nlai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	13	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	1	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	2.145	2.340	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	139	144,02	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	895	366,31	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	3.081.700	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,94	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,50	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,61	0,63	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	1.520	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	5.114	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	332	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	4.861	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	564.021	orang

I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	29	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 32 Nilai data mentah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2021

27. Jawa Barat

Nilai IWN di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 turun menjadi 0,074 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,078 (sangat kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 5,55%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan nilai pada faktor regulatory. Meskipun demikian, nilai faktor process dan faktor impact meningkat.

Nilai faktor regulatory menurun disebabkan menurunnya nilai frekuensi pembinaan nazhir dimana pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1 kali dalam setahun, sedangkan pada 2021 tidak diketahui data terkait frekuensi pembinaan nazhir.

Nilai faktor process meningkat karena luas lahan wakaf bersertifikasi BPN meningkat pada tahun 2021 yaitu mencapai 2.365,28 hektar, sedangkan pada tahun 2020 luas lahan wakaf bersertifikasi BPN hanya mencapai 2.226 hektar.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	27	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	13	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	72.813	82.551	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	2.226	2.365,28	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit

I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	5.194	6041.66	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	49.565.200	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,84	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,49	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,49	0,99	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	49.682	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	103.541	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	12.359	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	38.725	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	8.002.284	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	313	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 33 Nilai data mentah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021

Nilai faktor impact meningkat karena tersedianya data jumlah masjid wakaf (49.682 unit) dan jumlah masjid total (103.541 unit) yang digunakan untuk perhitungan rasio masjid wakaf serta tersedianya data jumlah sekolah wakaf (12.359 unit) dan jumlah sekolah total (38.725 unit) yang digunakan untuk perhitungan rasio sekolah wakaf. Selain itu nilai modifikasi IPM dan indeks kemandirian juga meningkat. Pada sisi lain nilai indeks kesejahteraan CIBEST pada IWN 2021 di Jawa Barat turun menjadi 0,25. Sedangkan pada IWN 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST Sulawesi Tengah mencapai angka 0,84.

28. Sulawesi Utara

Nilai IWN di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 turun menjadi 0,074 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,0125 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 40,72%. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan pada nilai faktor regulatory, faktor system, dan faktor impact.

Penurunan nilai faktor regulatory ini disebabkan oleh penurunan frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas. Pada tahun 2020, dilakukan pembinaan nazhir sebanyak 1 kali, sedangkan pada tahun 2021 tidak diketahui data terkait frekuensi pembinaan nazhir.

Adapun penurunan nilai faktor system disebabkan oleh penurunan manajemen informasi publik BWI daerah. Pada tahun 2020 BWI melakukan publikasi pada media internal dan media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik), sedangkan pada 2021 BWI hanya melakukan publikasi pada media internal (media sosial, website resmi). Walaupun luas lahan wakaf bersertifikasi BPN mengalami peningkatan dari 34 hektar pada 2020 menjadi 34,40 hektar, namun peningkatan tersebut tidak signifikan dibanding dengan penurunan manajemen informasi publik BWI daerah.

Selain nilai faktor regulatory dan system, nilai faktor impact juga mengalami penurunan karena menurunnya nilai indeks kesejahteraan CIBEST Provinsi Sulawesi Utara yang cukup signifikan, yaitu dari 0,81 menjadi 0,25.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	15	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	775	775	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	34	34,40	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah

I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	103	102,78	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	2.512.900	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,81	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,41	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,43	0,55	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	521	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	1.078	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	85	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	3.590	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	443.666	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	38	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 34 Nilai data mentah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2021

29. Sulawesi Selatan

Nilai IWN di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 turun menjadi 0,073 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,075 (sangat kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 3,11%. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan pada nilai faktor impact.

Nilai faktor impact mengalami penurunan karena penurunan nilai indeks kesejahteraan CIBEST, modifikasi IPM, dan indeks kemandirian. Pada tahun 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST mencapai 0,93, namun menurun pada tahun 2021 menjadi 0,25.

Selain itu, nilai modifikasi IPM juga mengalami penurunan dari 0,50 menjadi 0,25 pada tahun 2021. Nilai indeks kemandirian juga mengalami penurunan dari 0,59 menjadi 0,58 pada tahun 2021.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	24	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	7.109	7.526	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	361	383,05	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	906	974,12	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	N/A	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	8.888.800	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,93	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,50	0,25	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,59	0,58	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	5.699	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	16.837	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	614	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	11.131	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	1.614.070	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit

I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	92	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 35 Nilai data mentah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2021

Namun, pada tahun 2021, nilai faktor system mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan luas lahan wakaf bersertifikasi BPN dan peningkatan manajemen sistem informasi publik BWI daerah. Pada tahun 2020, luas lahan wakaf bersertifikasi BPN seluas 361 hektar, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 383,05 hektar. Walaupun demikian, peningkatan nilai faktor sistem ini tidak cukup signifikan dibandingkan dengan penurunan nilai faktor dampak yang terjadi, sehingga nilai IWN Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengalami penurunan.

30. Sumatera Utara

Nilai IWN di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 naik menjadi 0,070 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,051 (sangat kurang) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 30,07%. Peningkatan ini terjadi karena adanya kenaikan pada nilai faktor system dan nilai faktor impact.

Nilai faktor system mengalami kenaikan yang cukup signifikan disebabkan oleh adanya peningkatan luas lahan wakaf bersertifikasi BPN dari 794 hektar pada tahun 2020 menjadi 837,03 hektar pada tahun 2021.

Adapun peningkatan nilai faktor impact disebabkan oleh adanya kenaikan pada nilai modifikasi IPM dan indeks kemandirian. Pada tahun 2020, nilai modifikasi IPM 0,41, kemudian meningkat menjadi 0,50. Begitu juga nilai indeks kemandirian meningkat dari 0,43 menjadi 0,64 pada tahun 2021.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	33	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun

I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	10.857	11.881	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	794	837,03	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	8.223	7.943,34	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	14.798.400	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,81	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,41	0,50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0,43	0,64	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	6.869	unit
I26	Jumlah Masjid Total	9.831	15.435	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	1.131	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	17.124	17.331	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	1.678.075	2.977.227	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	216	160	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 36 Nilai data mentah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2021

31. Gorontalo

Nilai IWN di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 naik menjadi 0,070 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,051 (sangat kurang) atau terjadi peningkatan nilai IWN sebesar 30,07%. Peningkatan ini terjadi karena adanya kenaikan pada nilai faktor system dan nilai faktor impact.

Nilai faktor system mengalami kenaikan disebabkan peningkatan nilai indikator rasio wakaf tanah tersertifikasi BPN. Pada tahun 2020, luas lahan wakaf tanah bersertifikasi BPN mencapai 384,45 hektar dan luas lahan lahan wakaf tanah sertifikasi dan sertifikasi mencapai 1.772 hektar. Jika dirasiokan maka luas lahan wakaf tanah bersertifikasi dibandingkan luas lahan wakaf tanah total yaitu 0,223. Sedangkan pada 2021 luas lahan wakaf tanah bersertifikasi BPN mencapai 276,18 hektar dan luas lahan lahan wakaf tanah sertifikasi dan sertifikasi mencapai 391,25 hektar. Jika dirasiokan maka luas lahan wakaf tanah bersertifikasi dibandingkan luas lahan wakaf tanah total yaitu 0,704.

Adapun peningkatan nilai faktor impact disebabkan oleh adanya kenaikan pada nilai indeks kemandirian. Pada tahun 2020, nilai indeks kemandirian 0,44, kemudian meningkat menjadi 0,64.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	6	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	4	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	110	1.949	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	385,45	276,18	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	10.000.000	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	1.722	391,95	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	7	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	20	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	18.471	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	1.166.142	1.186.300	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,92	0,25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0,54	0,50	Nilai Indeks

I24	Indeks Kemandirian	0,44	0,64	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	8,00	1.493	unit
I26	Jumlah Masjid Total	2.305	2.839	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	208	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	59.93	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	5	162	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	657	1.611	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	50	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	67,6	211.217	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	1	N/A	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	13	13	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	10	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	450	N/A	orang

Tabel 37 Nilai data mentah Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021

32. Sulawesi Barat

Nilai IWN di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 turun menjadi 0,070 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,082 (sangat kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 14,71%. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan pada nilai faktor impact.

Penurunan nilai faktor impact disebabkan oleh penurunan nilai indeks kesejahteraan CIBEST, modifikasi IPM, dan indeks kemandirian. Pada tahun 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST mencapai 1, namun menurun pada tahun 2021 menjadi 0. Selain itu, nilai modifikasi IPM juga mengalami penurunan dari 0,50 menjadi 0,25 pada tahun 2021. Nilai indeks kemandirian yang juga mengalami penurunan dari 0,63 menjadi 0,53 pada tahun 2021.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	7	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit

I09	Jumlah nazhir perorangan	2,903	3,050	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	116	132,38	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	420	460,04	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	1,378,100	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	1.00	0.00	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.50	0.25	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.63	0.53	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	2,125	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	3,216	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	369	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	2,361	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	266,000	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	9	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 38 Nilai data mentah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2021

33. Riau

Nilai IWN di Provinsi Riau pada tahun 2021 turun menjadi 0,054 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,090 (sangat kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 40,31%. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan yang cukup signifikan pada nilai faktor system.

Nilai faktor system mengalami penurunan disebabkan menurunnya indikator rasio wakaf tanah tersertifikasi. Pada tahun 2020, luas lahan wakaf tanah bersertifikasi BPN mencapai 458 hektar dan luas lahan

tanah sertifikasi dan sertifikasi mencapai 2.907 hektar. Jika dirasioikan maka luas lahan wakaf tanah bersertifikasi dibandingkan luas lahan wakaf tanah total yaitu 0,218. Sedangkan pada 2021 luas lahan wakaf tanah bersertifikasi BPN mencapai 458,14 hektar dan luas lahan lahan wakaf tanah sertifikasi dan sertifikasi mencapai 8.217 hektar. Jika dirasioikan maka luas lahan wakaf tanah bersertifikasi dibandingkan luas lahan wakaf tanah total yaitu 0,056.

Walaupun demikian, terjadi peningkatan nilai faktor impact. Kenaikan nilai faktor dampak ini disebabkan oleh peningkatan pada modifikasi IPM dari 0,45 menjadi 0.75 pada tahun 2021.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nilai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	1	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	12	12	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	N/A	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	3	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	8,125	8,217	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	458	458,14	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	2,097	8,217	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	3	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	6,951,200	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.80	0.25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.45	0.75	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.55	0.60	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	5,744	unit
I26	Jumlah Masjid Total	6,578	14,079	unit

I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	1,076	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	7,274	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	1,302,896	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	75	62	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 39 Nilai data mentah Provinsi Riau tahun 2020-2021

34. Papua Barat

Nilai IWN di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 turun menjadi 0,036 (sangat kurang) dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki nilai IWN sebesar 0,131 (kurang) atau terjadi penurunan nilai IWN sebesar 72,41%. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan yang cukup signifikan pada nilai faktor regulatory, system, dan impact.

Nilai faktor regulatory mengalami penurunan karena adanya penurunan frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas. Pada tahun 2020 frekuensi pembinaan nazhir yaitu 1 kali dalam setahun, sedangkan pada tahun 2021 tidak diketahui data terkait frekuensi pembinaan nazhir.

Nilai faktor system menurun disebabkan oleh penurunan indikator manajemen informasi publik. Nilai indikator manajemen informasi publik pada tahun 2021 turun menjadi 1 dari yang sebelumnya 3 pada tahun 2020.

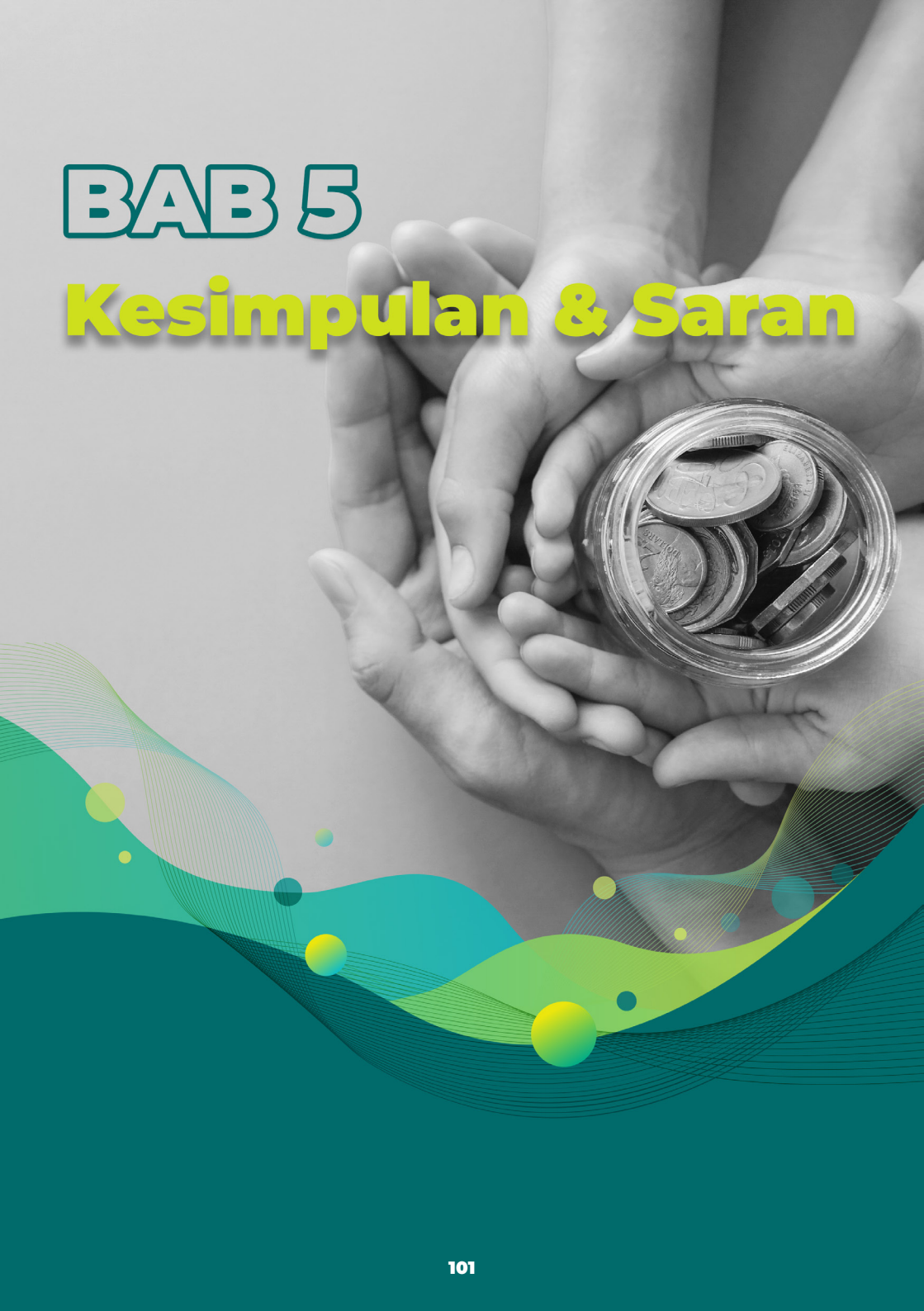
Selain itu, nilai faktor impact mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya indeks kesejahteraan CIBEST dan indeks kemandirian. Pada tahun 2020, nilai indeks kesejahteraan CIBEST mencapai 1,00 namun menurun pada tahun 2021 menjadi 0,25. Nilai indeks kemandirian yang juga mengalami penurunan dari 0,63 menjadi 0,61 pada tahun 2021.

Kode Item	Nama Item data mentah	2020	2021	Satuan
		Nilai Data Mentah	Nlai Data Mentah	
I01	Regulasi wakaf daerah	1	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I02	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	0	0	unit
I03	Jumlah kabupaten/kota total	N/A	13	unit
I04	Dukungan operasional BWI daerah dari APBD	N/A	N/A	Rupiah
I05	Dana Operasional BWI daerah	N/A	N/A	Rupiah
I06	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	N/A	kali dalam satu tahun
I07	Jumlah nazhir institusi	N/A	N/A	unit
I08	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	N/A	N/A	unit
I09	Jumlah nazhir perorangan	50	76	unit
I10	Luas lahan wakaf bersertifikasi BPN	6	7.33	hektar
I11	Valuasi aset wakaf non-tanah	N/A	N/A	Rupiah
I12	Surplus pengelolaan wakaf	N/A	N/A	Rupiah
I13	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	N/A	N/A	unit
I14	Audit KAP BWI daerah (Y/T)	N/A	N/A	Biner (1 untuk Ya, 0 untuk Tidak)
I15	Luas lahan wakaf (sertifikasi + non-sertifikasi)	20	105	hektar
I16	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	N/A	N/A	unit
I17	Manajemen informasi publik BWI daerah	3	1	Skala Likert (1, 3, dan 5)
I18	Unit aset wakaf produktif	N/A	N/A	unit
I19	Unit aset wakaf total	N/A	N/A	unit
I20	Jumlah mauquf 'alaih	N/A	N/A	orang
I21	Jumlah penduduk	N/A	986,000	orang
I22	Indeks Kesejahteraan CIBEST	1.00	0.25	Nilai Indeks
I23	Modifikasi IPM	0.50	0.50	Nilai Indeks
I24	Indeks Kemandirian	0.63	0.61	Nilai Indeks
I25	Jumlah Masjid Wakaf	N/A	9	unit
I26	Jumlah Masjid Total	N/A	514	unit
I27	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	N/A	N/A	m2 atau orang
I28	Luas/Kapasitas Masjid Total	N/A	N/A	m2 atau orang
I29	Jumlah Sekolah Wakaf	N/A	1	unit
I30	Jumlah Sekolah Total	N/A	1,711	unit
I31	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	N/A	N/A	orang
I32	Jumlah Siswa Total	N/A	221,141	orang
I33	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	N/A	0	unit
I34	Jumlah Rumah Sakit Total	N/A	14	unit
I35	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	N/A	N/A	orang
I36	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	N/A	N/A	orang

Tabel 40 Nilai data mentah Provinsi Papua Barat tahun 2020-2021

BAB 5

Kesimpulan & Saran



BAB 5 - KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Nilai IWN Nasional 2021 adalah 0,139, meningkat tipis (0,016) dari tahun 2020 sebesar 0,123. Kategori IWN 2020 termasuk dalam level “kurang” sama seperti tahun sebelumnya. Seluruh provinsi terklasifikasi dalam lima kategori IWN. Pada tahun 2021 ini, sebanyak dua puluh dua provinsi termasuk dalam kategori “Sangat Kurang”, lima provinsi “Kurang”, dua provinsi “Cukup”, dua provinsi “Baik”, dan terdapat tiga provinsi yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Sebelas provinsi mengalami pertumbuhan IWN yang positif, namun 23 provinsi mengalami pertumbuhan negatif.

Pada perhitungan IWN tahun 2021, hanya enam provinsi yang mengisi kuesioner, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Maluku. Lima provinsi dengan nilai IWN tertinggi adalah provinsi yang mengisi kuesioner. Provinsi Maluku yang juga mengisi kuesioner menempati peringkat ke-tujuh. Lima provinsi dengan pertumbuhan IWN tertinggi mengalami pertumbuhan pada faktor Regulatory.

5.2 Saran

Hanya enam BWI Provinsi yang mengisi kuesioner pada perhitungan IWN tahun 2021. Pada perhitungan IWN tahun selanjutnya, **agar dapat ditingkatkan partisipasi BWI Provinsi dalam mengisi kuesioner dengan benar, akurat, dan lengkap.** BWI Pusat dapat mengadakan sosialisasi IWN kepada BWI Provinsi sekaligus training mengenai pengisian kuesioner IWN untuk mencegah terjadinya data yang tidak akurat.

Kategori IWN dapat meningkat hingga empat level hanya dalam satu tahun dengan memperbaiki kinerja pada faktor Regulatory dan Institution. Oleh sebab itu, BWI Provinsi dapat menjadikan kedua faktor tersebut sebagai faktor strategis untuk meningkatkan nilai IWN di daerahnya masing-masing.

Perlu dirumuskan mengenai cara perhitungan nilai IWN Nasional yang lebih proporsional. Perhitungan IWN Nasional perlu mempertimbangkan faktor demografis dan geografis setiap provinsi seperti jumlah penduduk dan luas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Jalil, M. I., Yahya, S. and Allah Pitchay, A. (2019) 'Building committed Waqif: the role of information disclosure', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), pp. 185–215. doi: 10.1108/JIABR-05-2016-0058.
- Abduh, M. (2019) 'The Role of Islamic Social Finance in Achieving SDG Number 2: End hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition and Promote Sustainable Agriculture', *Al-Shajarah, (Special Issue Islamic Banking and Finance 2019)*, pp. 185 – 206.
- Abdullah, M. (2019) 'Waqf and trust: the nature, structures and socio-economic impacts', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), pp. 512–527. doi: 10.1108/JIABR-10-2016-0124.
- Abdullah, M. (2015) 'A New Framework of Corporate Governance for Waqf: A Preliminary Proposal', *Islam And Civilisational Renewal*, 6, pp. 353–370
- Abu Talib, N. Y., Abdul Latiff, R. and Aman, A. (2020) 'An institutional perspective for research in waqf accounting and reporting: A case study of Terengganu state Islamic Religious Council in Malaysia', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), pp. 400–427. doi: 10.1108/JIABR-11-2016-0132.
- Adewale, A. A. et al. (2012) 'The Role of Institutional Trust in the Adoption of Gold Dinar in Kelantan: An Empirical Analysis', *Journal of Applied Sciences*, pp. 1–8.
- Anwar, S. (2020) 'Urgency of Waqf Land Registration in the Context of Indonesian Land Reform', *Journal of Law and Legal Reform*, 1(January).
- Azman, S. M. S. and Ali, E. R. A. E. (2016) 'The potential of innovative financial tools: Social Impact Bond (SIB) and Sustainable and Responsible Investment (SRI) sukuk, towards the sustainable growth of the Islamic finance industry', *European Journal of Islamic Finance*, 4(2016), p. 9. doi: 10.13135/2421-2172/1644.
- Azmi, A. C. and Hanifa, M. H. (2015) 'The Sharia-compliance of financial reporting practices: a case study on waqf', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(1), pp. 55–72. doi: 10.1108/JIABR-10-2012-0069.
- Beik, I. S. and Arsyianti, L. D. (2016) 'Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), pp. 141–160. doi: 10.21098/jimf.v1i2.524.
- Che Mohd Salleh, M. et al. (2020) 'Developing a sustainable model of Waqf-based Takaful for flood victims in Malaysia', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. doi: 10.1108/JIABR-10-2016-0114.
- Dafterdar, H. (2013) 'Towards Effective Legal Regulation and Enabling Environment for Waqf', *Waqf Laws and Management. With Special Reference to Malaysia*, pp. 29–46.
- Gebara, R. E. A. (2018) 'The Relevance of Waqf to the Australian Society from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah (Higher Objectives of Shari'ah)', *Al-Shajarah*, 23(1), pp. 149–170. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Perspective of Maqasid Al-Shari'ah (Higher Objectives of Shari'ah)*, *Al-Shajarah*, 23(1), pp. 149–170. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Hassan, R., Alhabshi, S. M. bin S. J. and Yusoff, A. (2017) 'Towards Providing the Best Shari'ah Governance Practices for Waqf Based Institutions', *Al-Shajarah, (Special Issue: Islamic Banking and Finance)*, pp. 165–185. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Huda, N. et al. (2017) 'Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia', *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38(1), pp. 29–54.

- Ihsan, H. et al. (2017) 'A study of accountability practice in Dompét Dhuafa Waqf of Indonesia', *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(2), pp. 13–32. doi: 10.4197/Islec.30-2-2.
- Ihsan, H. and Mohamed Ibrahim, S. (2011) 'WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions: The cases of two WAQF foundations', *Humanomics*, 27(4), pp. 252–269. doi: 10.1108/08288661111181305.
- Karim, S. A. (2010) 'Contemporary Shari'a Compliance Structuring for the Development and Management of Waqf Assets in Singapore', *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), pp. 143–164. Available at: http://www.asafas.kyotou.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb3_2/09shamsiah.pdf.
- Khalil, I. A., Ali, Y. and Shaiban, M. (2014) 'Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia Learn From Their Experiences', in *International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014)*, pp. 69–83. Available at: <http://www.kuis.edu.my/i-maf2014/e proceedings/wakaf/W07 Ibrahim Khalil Waqaf 69-83.pdf>.
- Masruki, R. and Shafii, Z. (2013) 'The development of Waqf accounting in enhancing accountability', *Middle East Journal of Scientific Research*, 13(SPLISSUE), pp. 1–6. doi: 10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1873.
- Mutalib, H. A. and Maamor, S. (2016) 'Utilization of waqf property: Analyzing an institutional Mutawalli challenges in management practices', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), pp. 36–41.
- Mohammad, M. T. S. H. (2015) 'Theoretical and trustees' perspectives on the establishment of an Islamic social (Waqf) bank', *Humanomics*, 31(1), pp. 37–73. doi: 10.1108/H-05-2013-0032.
- Noordin, N. H., Haron, S. N. and Kassim, S. (2017) 'Developing a Comprehensive Performance Measurement System for Waqf Institutions', *International Journal of Social Economics*, 44(7), pp. 921–936. doi: 10.1108/IJSE-09-2015-0257.
- Osman, A. Z. and Agyemang, G. (2020) 'Privileging downward accountability in Waqf management', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), pp. 533–554. doi: 10.1108/JIABR-05-2017-0064.
- Puskas BAZNAS (2016) Indeks Zakat Nasional. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Pyeman, J., Hasan, H. and Ahmad, I. (2016) 'Modernizing Waqf Performance Evaluation By Waqf Management Efficiency Index', *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2), pp. 1–7.
- Sadeq, A. M. (2002) 'Waqf, perpetual charity and poverty alleviation', *International Journal of Social Economics*, 29(1–2), pp. 135–151. doi: 10.1108/03068290210413038.
- Siraj, S. A. (2012) *An Empirical Investigation into the Accounting, Accountability and Effectiveness of Waqf Management in the State Islamic Religious Councils (SIRCs) in Malaysia*. Cardiff University.
- Siswanto, D., Rosdiana, H. and Fathurahman, H. (2017) 'Islamic Accountability Index of Cash Waqf Institution in Indonesia', in Gani, L. et al. (eds) *Competition and Cooperation in Economics and Business*. doi: 10.1201/9781315225227.
- Sukmana, R., Sholihin, M. Beik, I.S., Lestari, D.L., Indrawan, I.W., Ajija, S.R. (2021). 'National Waqf Index: A Measurement for Waqf Performance', *BWI Working Paper Series (BWPS)*, BWPS No 1/PKTD/BWI/III/2021
- Sulaiman, M. and Alhaji Zakari, M. (2019) 'Financial sustainability of state waqf institutions (SWIs) in Malaysia', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), pp. 236–258. doi: 10.1108/JIABR-05-2016-0054.

Thaker, M. A. B. M. T. and Pitchay, A. A. (2018) 'Developing waqf land through crowdfunding-waqf model (CWM): the case of Malaysia', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), pp. 448–456. doi: 10.1108/JIABR-05-2016-0062.

Winarsih, R., Masrifah, A. R. and Umam, K. (2019) 'the Integration of Islamic Commercial and Social Economy Through Productive Waqf To Promote Pesantren Welfare', *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), pp. 321–340. doi:10.21098/jimf.v5i2.1065.

Zain, N. R. M., Mahadi, N. F. and Noor, A. M. (2019) 'The potential in reviving waqf through crowdfunding technology: The case study of thailand', *Al-Shajarah, (Special Issue Islamic Banking and Finance)*, pp. 89–106.

